

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN JAWA TENGAH 2014



<http://jate.bps.jateng.go.id>



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN JAWA TENGAH 2014



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN JAWA TENGAH 2014

ISBN : 978-602-0916-46-0
No. Publikasi : 33520.1509
Katalog BPS : 4601001.33
Ukuran Buku : 17,5 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 67 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Penyunting :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Perkembangan politik sejak era reformasi telah berkembang pesat, tercermin dari banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu serta semakin berimbangnnya peran lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah dan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung membuat politik di Indonesia semakin dinamis.

Dinamika yang terjadi di dunia politik berimbas pada bidang lain terutama bidang keamanan. Politik dan keamanan saling terkait satu sama lain. Suatu ketika politik mempengaruhi keamanan dan di lain waktu keamanan mempengaruhi politik.

Perkembangan politik dan keamanan yang dinamis tersebut memerlukan alat untuk memonitoring. Karena itu diperlukan adanya data yang bias memonitor dinamika politik dan keamanan. Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2014 ini merupakan hasil survey Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2014 yang bersumber dari dinas/instansi terkait. Dalam publikasi ini disajikan pula penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data akan lebih memahami informasi yang disajikan.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna data secara cepat dan mudah. Pada sisi lainnya informasi tersebut akan mempermudah para pengambil kebijakan baik di pemerintahan maupun legislatif untuk melakukan perencanaan dan monitoring. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Oktober 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



y Drs. Ibram Syahboedin, M.A

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Politik	2
1.1.2 Keamanan	2
1.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
BAB II. METODOLOGI	5
2.1 Sumber Data	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Konsep dan Definisi	6
BAB III. PENDUDUK DAN KEGIATAN POLITIK	11
3.1 Penduduk	11
3.2 Pemilihan Umum	12
3.3 Pemilu Legislatif 2014	13
3.3.1 Pemilu Anggota DPR RI dan DPD	15
3.3.2 Pemilu Anggota DPRD Provinsi	16
3.3.3 Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah	18
3.4 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	20

	Halaman
3.5 Pemilihan Kepala Daerah	22
3.5.1 Partisipasi Penduduk dalam Pilkada	23
3.5.2 Perolehan Suara Pasangan Terpilih Dalam Pilkada	26
BAB IV. KEAMANAN	29
4.1 Indikator Utama Kejahatan	29
4.2 Jumlah Orang yang Terlibat Tindak Kejahatan	32
4.3 Jenis Tindak Pidana	33
LAMPIRAN	35
DAFTAR PUSTAKA	65
REFERENSI INTERNET	67

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel A	Jumlah Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Jenis Kejahatan, 2014	33
Tabel 1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2014	37
Tabel 2	Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Menggunakan Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2014	38
Tabel 3	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilu Legislatif 2014 untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Menurut Kabupaten/Kota	39
Tabel 4	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilu Legislatif 2014 untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut Kabupaten/Kota	40
Tabel 5	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilu Legislatif 2014 untuk Memilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota	41
Tabel 6	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Menurut Daerah Pemilihan	42
Tabel 7	Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin, Periode 2014-2019	44

		Halaman
Tabel 8	Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Kelompok Umur, Periode 2014-2019	45
Tabel 9	Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Pendidikan, Periode 2014-2019	46
Tabel 10	Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Menggunakan Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	47
Tabel 11	Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	48
Tabel 12	Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Menggunakan Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	49
Tabel 13	Jumlah Pemilih, Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2013	50
Tabel 14	Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir Kabupaten/Kota Selama 2010-2013	51
Tabel 15	Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Menggunakan Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Bupati/Walikota 2010 - 2013	52
Tabel 16	Jumlah Pemilih, Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilkada Bupati/Walikota 2010 - 2013	53
Tabel 17	Perolehan Suara Kepala Daerah dan Partai Pengusungnya, 2010-2013	54

		Halaman
Tabel 18	Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Jabatan Sebelumnya dan Tanggal Pelantikan, Periode 2010-2014	55
Tabel 19	Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja 2014	57
Tabel 20	Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas Menurut Jenis Indikator 2012-2014	58
Tabel 21	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2014	59
Tabel 22	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) per 10.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2014	60
Tabel 23	Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2014	61
Tabel 24	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clearance Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2014	62
Tabel 25	Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kabupaten/Kota, Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin, 2014	63
Tabel 26	Sepuluh Jenis Kejahatan Konvensional yang Sering Terjadi, 2014	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2014	12
Gambar 2. Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Memilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah	17
Gambar 3. Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin, 2014	18
Gambar 4. Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur, 2014	19
Gambar 5. Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Tingkat Pendidikan, 2014	20
Gambar 6. Persentase Pemilih Terdaftar yang Menggunakan Hak Pilih pada Pilkada Terakhir Tingkat Kabupaten/Kota, 2010-2013	24
Gambar 7. Persentase Pemilih Terdaftar yang Menggunakan Hak Pilih pada Pilkada Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	25
Gambar 8. Persentase Perolehan Suara Kepala Daerah Terpilih Dalam Pilkada Kabupaten/Kota, 2010-2013	26
Gambar 9. Persentase Bupati/Walikota Terpilih Menurut Jenis Kelamin, Periode 2010-2014	27
Gambar 10. Persentase Bupati/Walikota Terpilih Menurut Pendidikan, Periode 2010-2014	28

	Halaman
Gambar 11. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2014	30
Gambar 12. Jumlah Perkara Tindak Pidana Yang Dilaporkan dan Diselesaikan, 2012 - 2014	31
Gambar 13. Jumlah Perkara Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara 2014	34

<http://jateng.bps.go.id>

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah dewasa ini nampaknya dapat ditunjukkan dengan baik oleh tingkat kerawanan/potensi konflik di wilayah yang bersangkutan. Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam real politik Indonesia, paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral pada presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal, dari dua level tersebut yang paling dominan untuk daerah adalah pemencaran vertikal yang dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Isu-isu bidang politik dan keamanan sangatlah kompleks dan multidimensi. Permasalahan bidang politik dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi, khususnya selama rentang waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II (RPJMN) 2010-2014 tidaklah ringan. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak pada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Perkembangan kondisi politik yang cukup pesat juga berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik dan keamanan. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan, karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu antar wilayah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berupaya memenuhi kebutuhan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan yang dituangkan melalui publikasi. Output dari publikasi ini dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan.

1.1.1 Politik

Perkembangan politik merupakan sebuah kondisi yang mencakup seluruh ruang lingkup ilmu politik yang tumbuh, berkembang, atau mengalami kemunduran pada satu dekade kepemimpinan. Perkembangan politik di Indonesia sebagai bagian dari kehidupan sosial-politik secara umum mengalami pasang surut. Perkembangan politik sebagai salah satu tujuan berpolitik, menjadi bagian dari pengertian-pengertian yang dibuat maupun sikap-sikap yang berkembang untuk mewujudkan politik sebagai bagian dari kualitas suatu bangsa. Politik juga menjadi acuan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bertransformasi pada kecapaian sistem yang baik, dan terjaminnya suatu pemerintahan yang baik.

1.1.2 Keamanan

Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat pada status keamanan di suatu wilayah. Permasalahan yang ditimbulkan dari mulai masalah hukum, keamanan dan ketertiban juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, menuntut para pelaksana di bidang ini untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

1.2 Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2014 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik dan keamanan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan data tentang politik serta gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang dirinci menurut Kabupaten/Kota

<http://jateng.bps.go.id>

BAB II. METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2014 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Nara sumber Survei Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Instansi provinsi sebagai nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan instansi kabupaten/kota yang menjadi nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota, Polres/Polresta di kabupaten/kota, Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota, Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2014 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait secara berjenjang. BPS Kabupaten/Kota mengumpulkan data dari instansi terkait untuk kemudian dikirim ke BPS Provinsi Jawa Tengah. Pada tingkat provinsi, BPS Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kompilasi data dari instansi yang menjadi nara sumber. Selanjutnya data yang sudah masuk dari kabupaten/kota serta data yang dikompilasi di tingkat provinsi diolah menjadi tabel-tabel yang disajikan dalam lampiran pada publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2014 ini.

2.3 Konsep dan Definisi

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).

Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu), yaitu:

- 1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan,:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;.

- d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
 - g. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah:

- ❖ Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.

- ❖ Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- ❖ Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
- ❖ Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- ❖ Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- ❖ Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Tindak Kriminalitas adalah:

- ❖ Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
- ❖ Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
- ❖ Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
- ❖ Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
- ❖ Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur:

- ❖ Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- ❖ Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- ❖ Umum adalah anak-anak dan dewasa.

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

<http://jateng.bps.go.id>

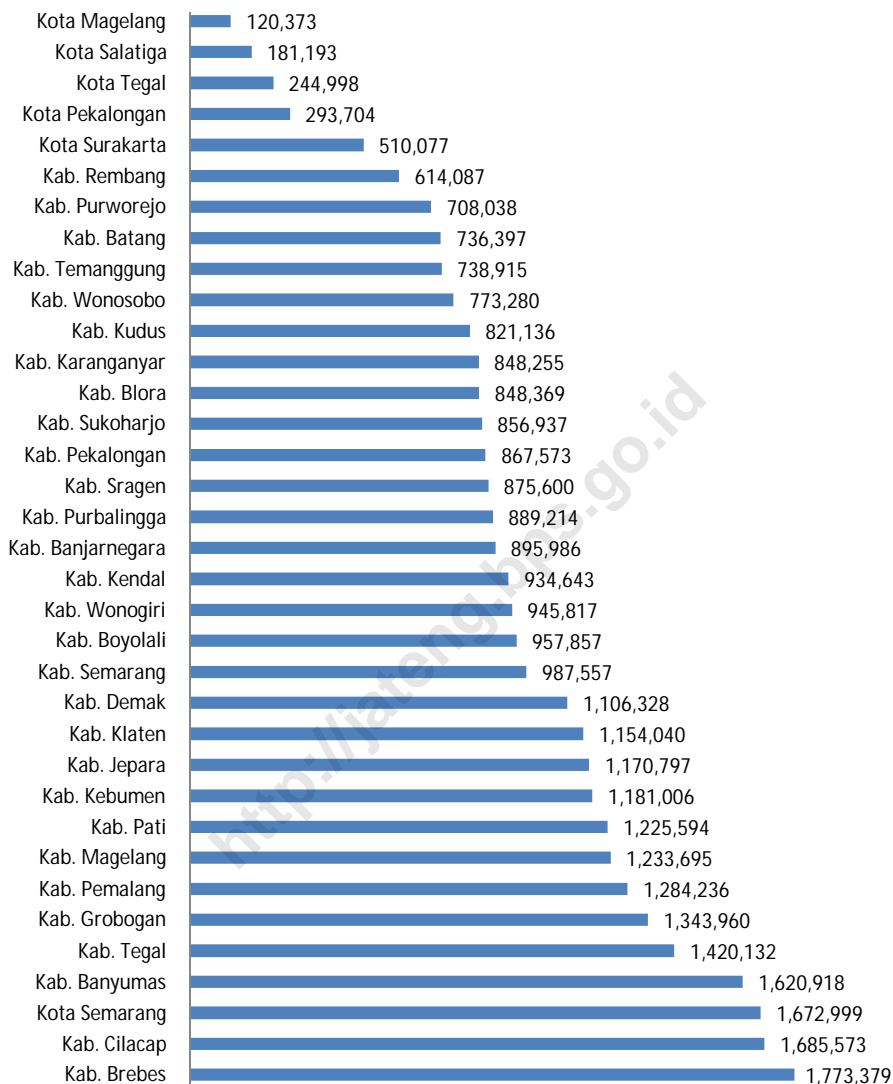
BAB III. PENDUDUK DAN KEGIATAN POLITIK

3.1 Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Begitu pula dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Jumlah penduduk dalam kegiatan politik merupakan modal yang sangat menentukan kemenangan dalam perolehan suara, sedangkan dalam bidang keamanan, semakin banyak penduduk semakin banyak pula permasalahan yang akan timbul.

Berdasar Gambar 1. diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk yang paling banyak adalah Kabupaten Brebes dengan jumlah penduduk sebanyak 1.773.379 jiwa, disusul Kabupaten Cilacap sebanyak 1.685.573 jiwa dan Kota Semarang sebanyak 1.672.999 jiwa. Sebaliknya Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Tegal merupakan wilayah di Jawa Tengah yang mempunyai jumlah penduduk paling sedikit, yaitu masing-masing sejumlah 120.373 jiwa, 181.193 jiwa dan 244.998 jiwa. Dengan melihat besaran jumlah penduduk, partai politik peserta pemilu dapat mengukur kekuatannya dalam memenangkan pemilu sebab rakyat memegang kedaulatan secara penuh. Suara rakyat yang disalurkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sangat menentukan.

Gambar 1. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2014



Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk SP2010, BPS Provinsi Jawa Tengah

3.2 Pemilihan Umum

Keberadaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting. Dikatakan demikian karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan

politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti *et al*, 2008:12).

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu Pemilu, yaitu pemilu legislatif yang diselenggarakan lima tahunan. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2004 Indonesia mengenal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun yang sama ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian sejak tahun 2004, di Indonesia dikenal tiga pemilihan; Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

3.3 Pemilu Legislatif 2014

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2014 diselenggarakan pada secara serentak di seluruh wilayah Indonesia tanggal 9 April 2014, yaitu untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia periode 2014-2019.

Pemilu bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan partisipasi politik. Namun demikian, bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur melalui Pemilu, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Pada negara-negara demokrasi, tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tingginya tingkat partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula. Tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam pemilu legislatif 2014 ditunjukkan pada Tabel 2 dalam lampiran.

Tinggat partisipasi pemilih di Jawa Tengah pada pelaksanaan pemilu legislatif 2014 mencapai 73,24 persen. Daerah dengan partisipasi pemilih tertinggi berada di Kabupaten Temanggung dengan tingkat partisipasi 84,54

persen, disusul kabupaten Rembang (84,25 persen) dan Kota Salatiga (82,91 persen). Sedangkan partisipasi terendah pada pemilu legislatif 2014 berada di Kabupaten Tegal dengan tingkat partisipasi sekitar 64,12 persen, disusul Kabupaten Brebes(64,23 persen) (lampiran Tabel 2). Kondisi ini perlu dicari permasalahannya, apakah disebabkan karena sosialisasi pelaksanaan pemilu yang kurang dipahami oleh masyarakat, penduduk yang tidak lagi respon terhadap pemilu, atau data pemilih yang bermasalah. Kurangnya partisipasi penduduk untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan anggota legislatif sebagai wakil rakyat, seharusnya bisa menjadi perhatian ke depan untuk mensukseskan pemilu. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu dan dibutuhkan profesionalisme panitia penyelenggara pemilu.

Sistem pemilu 2014 juga menerapkan konsep daerah pemilihan (Dapil). Pembentukan Dapil Pemilu 2014 terdapat dalam Lampiran UU No. 8/2012. Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah dibagi menjadi sepuluh Dapil, yakni:

- Dapil Jateng I meliputi: Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kota Salatiga. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPR RI, dan sebelas kursi DPRD Provinsi.
- Dapil Jateng II meliputi: Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar tujuh kursi DPR RI dan sembilan kursi DPRD Provinsi.
- Dapil Jateng III meliputi: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar sembilan kursi DPR RI dan sebelas kursi DPRD Provinsi.
- Dapil Jateng IV meliputi: Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar tujuh kursi DPR RI dan tujuh kursi DPRD Provinsi.
- Dapil Jateng V meliputi: Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPR RI dan sepuluh kursi DPRD Provinsi.

- Dapil Jateng VI meliputi: Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPR RI dan sebelas kursi DPRD Provinsi.
- Dapil Jateng VII meliputi: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar tujuh kursi DPR RI dan sepuluh kursi DPRD Provinsi.
- Dapil Jateng VIII meliputi: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPR RI dan sepuluh kursi DPRD Provinsi.
- Dapil Jateng IX meliputi: Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPR RI dan sepuluh kursi DPRD Provinsi.
- Dapil Jateng X meliputi: Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar tujuh kursi DPR RI dan sebelas kursi DPRD Provinsi.

3.3.1 Pemilu Anggota DPR RI dan DPD

Sejak perubahan ke-4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Pada periode 2009-2014, jumlah anggota DPR RI sebanyak 560 orang dan jumlah anggota DPD sebanyak 132 orang, sehingga jumlah anggota MPR RI seluruhnya sebanyak 692 orang.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota DPR RI dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu dan dipilih oleh rakyat melalui pemilu legislatif. Tabel 3 dalam lampiran menampilkan jumlah suara sah, suara tidak sah dalam pemilihan anggota DPR RI periode 2014-2019.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga bagian dari MPR yang berasal dari wakil-wakil daerah yang berasal dari semua provinsi. Keberadaan lembaga ini sejak diundangkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 22 C dan 22 D. Anggota DPD

untuk setiap provinsi ditetapkan 4 orang dan dipilih melalui pemilu legislatif. Jumlah suara sah dan tidak sah dalam pemilihan anggota DPD Jawa Tengah ditampilkan dalam lampiran Tabel 4.

3.3.2 Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Undang-Undang No 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pada Pemilu DPRD Provinsi, tidak dikenal *parliamentary threshold* sehingga banyak partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI tetapi memiliki kursi di DPRD. Di Provinsi Jawa Tengah. Pada pemilu legislatif tahun 2014, jumlah kontestan peserta pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 12 (dua belas) partai politik, yaitu: Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Tabel 5 dalam lampiran menunjukkan bahwa dari 20.044.535 suara yang masuk, sekitar 84,84 persen atau 17.006.750 suara dinyatakan sah dan 15,16 persen atau 3.307.785 suara dinyatakan tidak sah. Perolehan suara sah partai politik dalam pemilu DPRD Provinsi Tahun 2014 menurut Dapil ditampilkan pada Tabel 6 dalam lampiran.

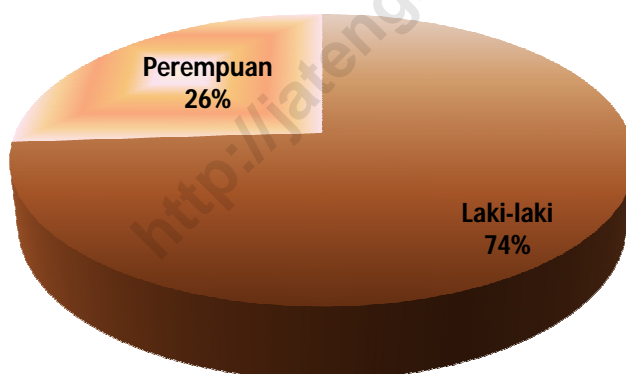
Gambar 2. Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Memilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah



3.3.3 Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah anggota legislatif pilihan rakyat atau wakil rakyat yang mewakili aspirasi dari rakyat. Di dalam undang-undang pemilu ada kewajiban bagi parpol untuk memenuhi sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang menjadi bakal calon legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu pada Pasal 58 dan 59 serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 11 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD. Keterwakilan perempuan dalam anggota dewan akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang dewan, terutama keputusan yang menyangkut keberpihakan terhadap perempuan.

Gambar 3. Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin, 2014



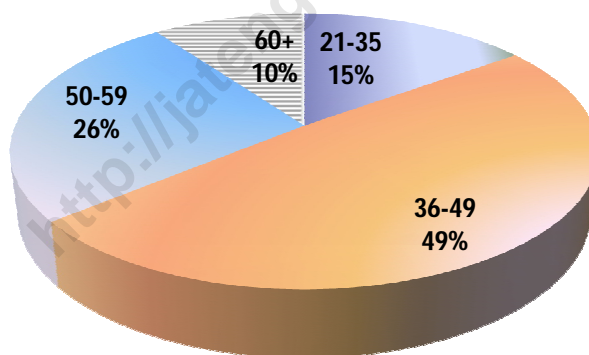
Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Data bulan September 2014

Secara umum semua partai politik peserta pemilu telah mengusung perempuan sebagai caleg, sesuai dengan undang-undang pemilu sebanyak 30 persen dari total calon yang ada. Namun demikian jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang belum memenuhi kuota 30 persen. Gambar 3. menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berjenis kelamin perempuan hanya 24 persen, sedangkan laki-laki 76 persen. Dilihat

dari asal partainya, persentase terbesar anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan berasal dari partai Golongan Karya (Golkar) dan PDI-Perjuangan masing-masing mencapai 40 persen dan 37,04 persen. Namun demikian tidak ada satu pun anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berjenis kelamin perempuan yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. (Lampiran Tabel 7)

Bila dilihat dari kelompok umur, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sekitar 64 persen pada kelompok usia muda (21 – 49 tahun). Kondisi ini tentunya diharapkan lebih meningkatkan kinerja anggota dewan, dengan harapan pada kelompok usia produktif ini hasil kinerja dewan juga lebih produktif. Namun demikian, masih terdapat kelompok usia tua (60 tahun ke atas) yang mencapai 10 persen (Gambar 4.).

Gambar 4. Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur, 2014



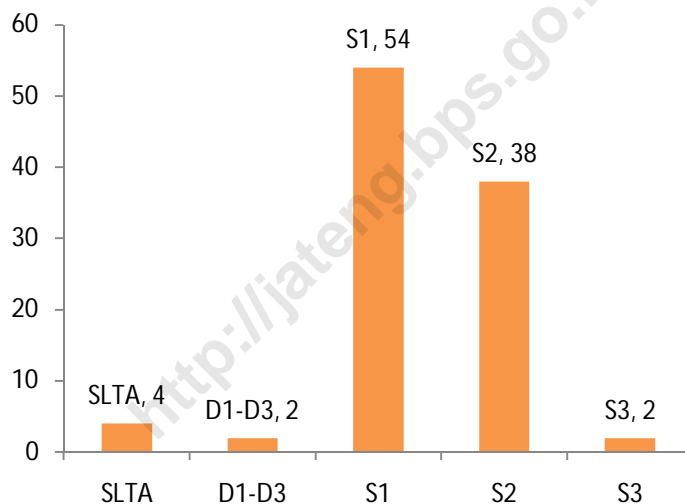
Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Data bulan Oktober 2014

Pada Gambar 5. terlihat bahwa secara keseluruhan, tingkat pendidikan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sekitar 40 persen (40 orang) adalah tamatan S2/S3, sekitar 54 persen (54 orang) berpendidikan tamat Sarjana baik DIV maupun S1, dan 2 persen (2 orang) tamat D1-D3. Namun masih terdapat sekitar 4 persen (4 orang) yang berpendidikan setingkat SLTA. Bila dilihat dari asal partainya, persentase anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tamat

SLTA berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu sebesar 30 persen dan PDI Perjuangan sebesar 3,7 persen (lampiran Tabel 9).

Tingkat pendidikan yang tinggi para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan pemikiran yang lebih cemerlang dalam mengambil keputusan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentunya dengan semakin tinggi pendidikan akan mewarnai pola pikir dan cara pandang anggota DPRD terhadap suatu permasalahan dan dalam mengambil keputusan.

Gambar 5. Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Tingkat Pendidikan, 2014



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Data bulan September 2014

3.4 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara

rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014 (pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan wakil presiden masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung yang ketiga di Indonesia. Pilpres 2014 diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 31 Mei 2014 dan pengundian nomor urutnya dilakukan pada 1 Juni 2014.

Tingkat partisipasi pemilih Jawa Tengah pada pelaksanaan Pilpres 2014 tercatat sebesar 71,25 persen, yaitu dari 27.606.063 pemilih yang terdaftar, 19.668.404 pemilih menggunakan hak pilihnya (lampiran Tabel 10). Kabupaten Temanggung, Kota Salatiga dan Kota Surakarta merupakan kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi pada Pilpres 2014, masing-masing mencapai 83,37 persen, 81,78 persen dan 81,23 persen. Sebaliknya persentase kehadiran pemilih untuk menggunakan hak pilih dalam Pilpres 2014 terendah di Kabupaten Brebes (61,59 persen), Kabupaten Pemasang (61,64 persen) dan Kabupaten Tegal (62,53 persen).

Jumlah suara sah dan tidak sah pada pemilu presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang berlangsung di Jawa Tengah disajikan dalam lampiran Tabel 11. Dari 19.668.404 suara yang masuk, sekitar 98,87 persen atau 19.445.260 suara dinyatakan sah dan 1,13 persen atau 223.144 suara dinyatakan tidak sah.

3.5 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut paling tidak secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD. Dasar hukum penyelenggaraan pilkada yaitu:

- Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang (UU) Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU No 3 Tahun 2005

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada tersebut mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut. Mengenai mekanisme pencalonan, ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

- Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
- Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;

- Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam parpol atau gabungan parpol.

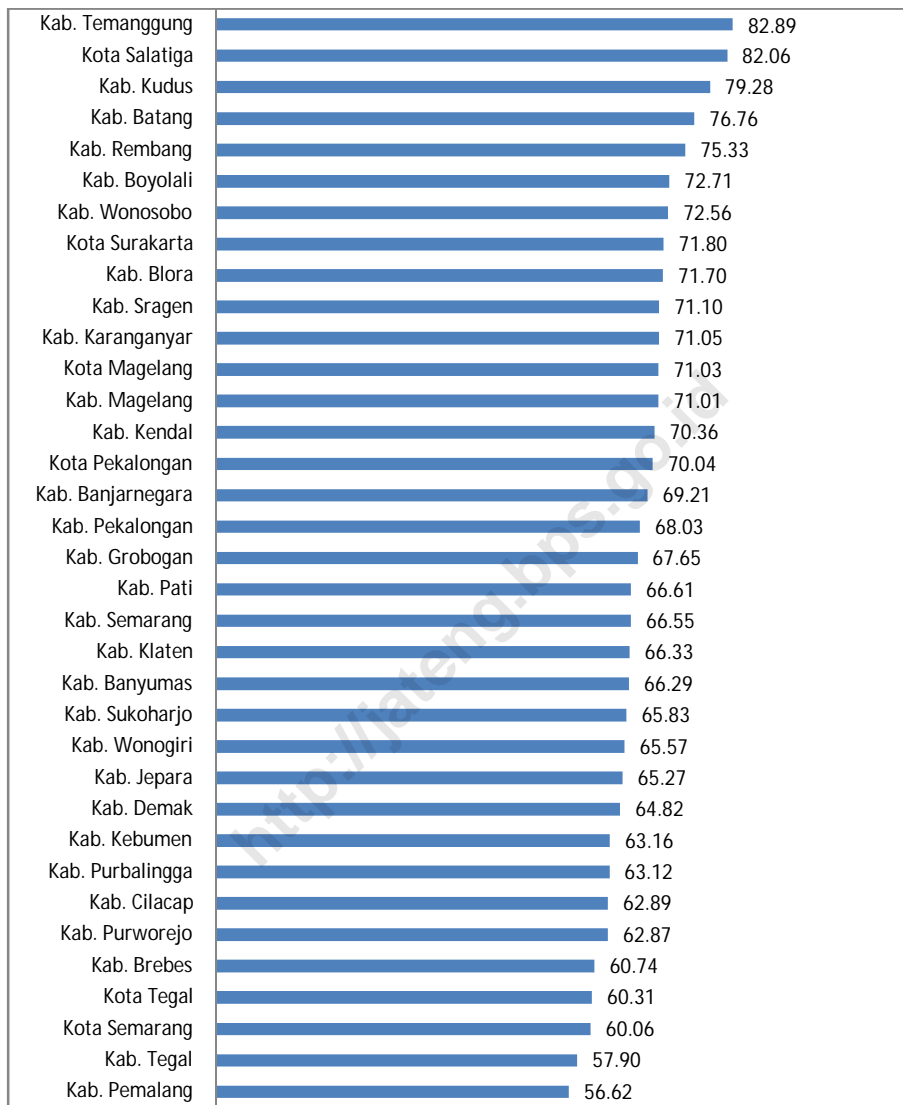
Aspirasi publik yang menginginkan adanya calon perseorangan atau “independen” kemudian dilegalisasi dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi yang membuka peluang untuk calon independen untuk turut maju ke kancah pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditampilkan dalam lampiran pada Tabel 12 sampai dengan Tabel 18.

3.5.1 Partisipasi Penduduk dalam Pilkada

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, pada Pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa: “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Hak memilih ini juga termasuk dalam pelaksanaan Pilkada di kabupaten/kota setempat.

Berdasarkan data yang tersedia dari pelaksanaan Pilkada terakhir di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah, partisipasi pemilih yang tertinggi berada di Kabupaten Temanggung mencapai 82,89 persen pada Pilkada Bupati Temanggung yang dilaksanakan tanggal 26 Mei 2013. Namun demikian masih banyak penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya. Persentase terkecil partisipasi pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada bupati/walikota terakhir di kabupaten/kota di Jawa Tengah terjadi di Kabupaten Pemasang pada saat pilkada bupati yang dilaksanakan 31 Oktober 2010 yakni sekitar 56,62 persen (lampiran Tabel 15).

Gambar 6. Persentase Pemilih Terdaftar yang Menggunakan Hak Pilih pada Pilkada Terakhir Tingkat Kabupaten/Kota, 2010 - 2013

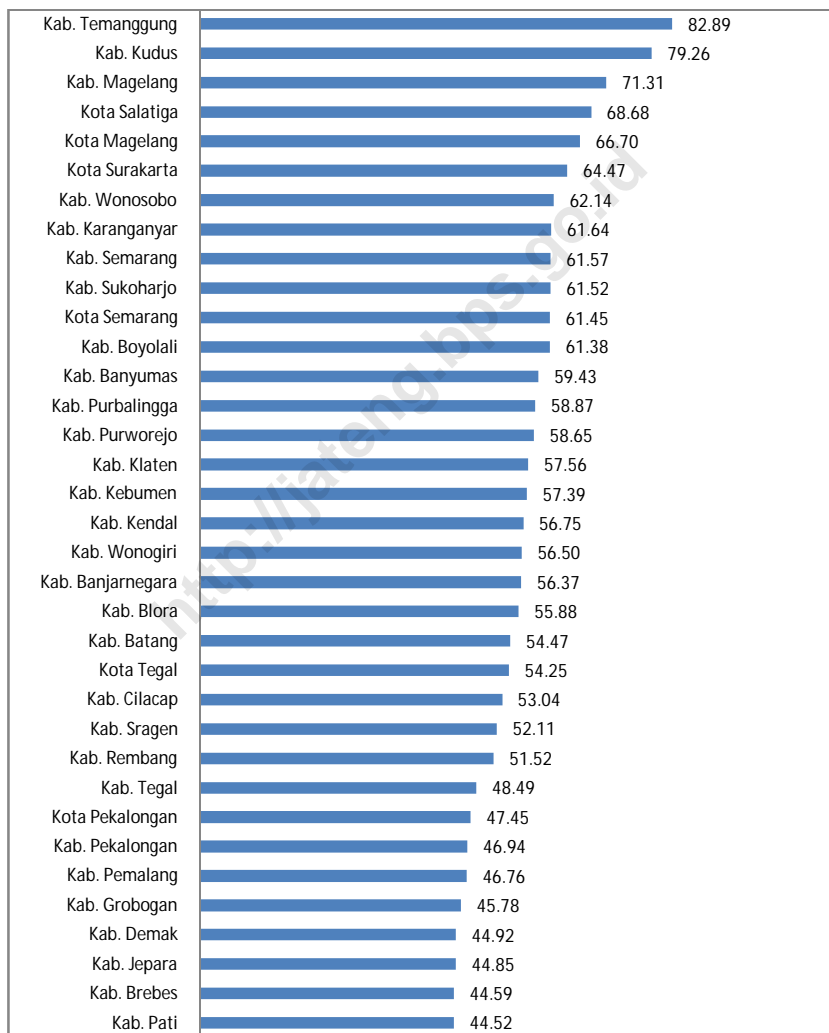


Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Sementara pada Pilkada Gubernur Jawa Tengah, tingkat partisipasi pemilih di Jawa Tengah mencapai 55,73 persen. Daerah dengan partisipasi pemilih tertinggi berada di Kabupaten Temanggung dengan tingkat partisipasi 82,89 persen, disusul kabupaten Kudus sebanyak 79,26 persen. Sedangkan

partisipasi terendah pada pilkada gubernur Jawa Tengah yang dilaksanakan tanggal 26 Mei 2013 berada di Kabupaten Pati yang hanya 44,52 persen dan disusul Kabupaten Brebes dengan tingkat partisipasi sekitar 44,59 persen (lampiran Tabel 12).

Gambar 7. Persentase Pemilih Terdaftar yang Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2013

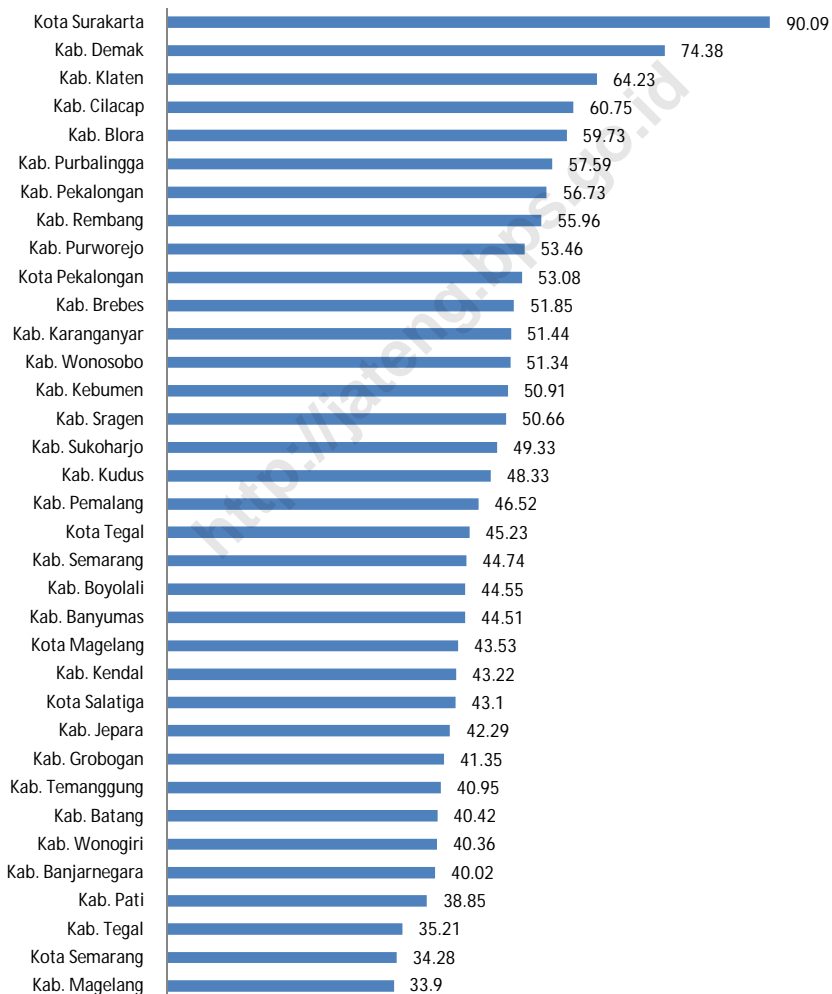


Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

3.5.2 Perolehan Suara Pasangan Terpilih Dalam Pilkada

Jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pilkada akan menentukan kemenangan pasangan calon bupati/walikota. Besaran dukungan suara masyarakat sebagai penentu kemenangan dalam pilkada dapat mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon bupati/walikota.

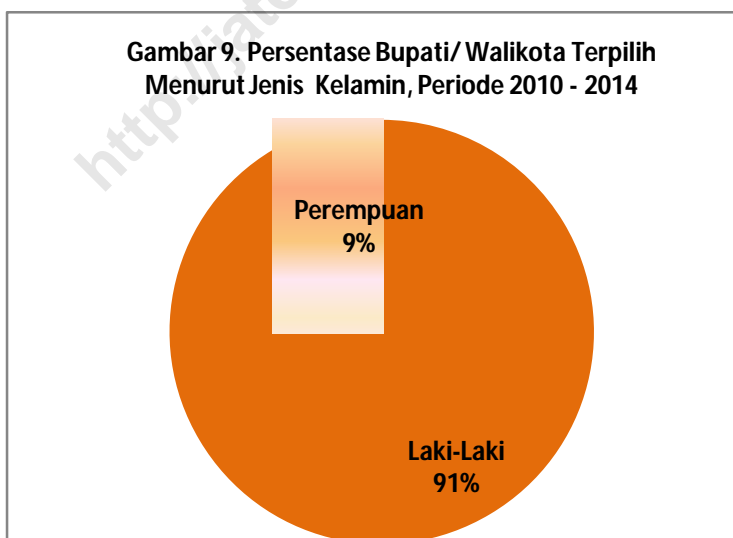
Gambar 8. Persentase Perolehan Suara Kepala Daerah Terpilih Dalam Pilkada Kabupaten/Kota, 2010 - 2013



Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Besaran jumlah perolehan suara antarkabupaten/kota tentunya akan sangat tergantung pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan yang menggunakan hak pilihnya serta banyaknya kandidat yang ikut dalam bursa pemilihan calon bupati/walikota. Jika dilihat dari besaran jumlah suara pasangan yang terpilih dalam pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh suara terbanyak pada pilkada bupati/walikota adalah pasangan terpilih pilkada di Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 555.044 suara sekitar 60,75 persen yang diikuti oleh dua kandidat pasangan calon bupati/wakil bupati (lampiran Tabel 17).

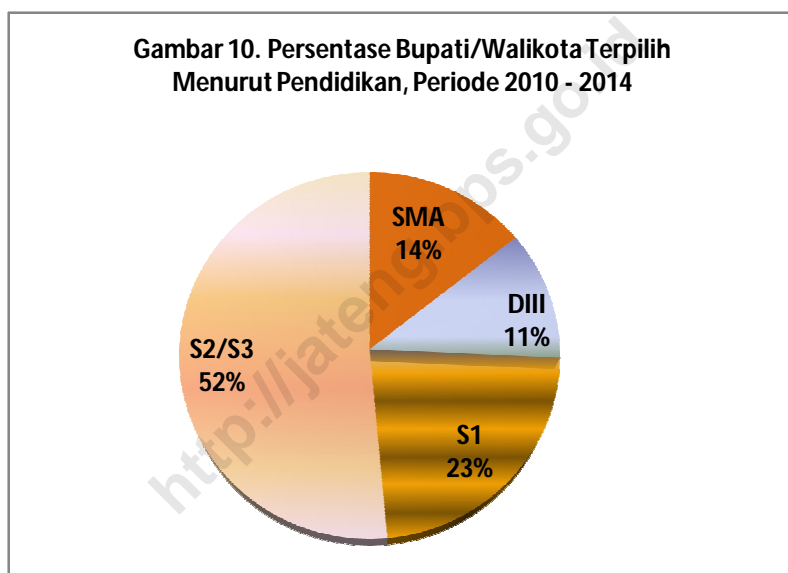
Berdasarkan jenis kelamin, bupati/walikota terpilih pilkada terakhir sebanyak 32 kepala daerah (91,43 persen) adalah laki-laki dan sebanyak 3 (tiga) kepala daerah (sekitar 8,57 persen) berjenis kelamin perempuan. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti tingkat kualitas dari calon bupati/walikota, atau bahkan mungkin karena masyarakat yang secara umum masih menyukai dipimpin oleh laki-laki (lampiran Tabel 18).



Jika kualitas yang menjadi pertimbangan para pemilih dalam menentukan calon kepala daerah yang akan dipilih, tentunya ini harus menjadi perhatian bagi para peserta pemilu untuk memilih calon

bupati/walikota yang mempunyai kualitas pendidikan dan kepemimpinan yang lebih baik, namun bila penyebabnya adalah karena masih kuatnya pandangan bahwa pemimpin adalah laki-laki maka akan lebih sulit mengubah paradigma sosial yang ada di masyarakat.

Tingkat pendidikan sangat menentukan cara pandang seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan tingginya pendidikan kepala daerah tentunya akan lebih meningkatkan kualitas hasil dari kinerja kepala daerah itu sendiri dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayahnya.



Bila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir bupati/walikota hasil pilkada di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sekitar 74,29 persen berpendidikan sarjana ke atas dengan rincian sebanyak 2,86 persen tamat S3, 48,57 persen tamat S2 dan 22,86 persen tamat S1. Sedangkan yang berpendidikan Diploma III sekitar 11,43 persen dan yang berpendidikan setingkat SLTA hanya sekitar 14,29 persen(Lampiran Tabel 18).

BAB IV. KEAMANAN

4.1 Indikator Utama Kejahatan

Menurut falsafah, dalam kehidupan negara aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri dari ancaman dari luar dan dalam negeri, negara tidak dapat mempertahankan hidupnya, termasuk didalamnya permasalahan hukum yang mengaturnya yang berhubungan erat dengan keamanan.

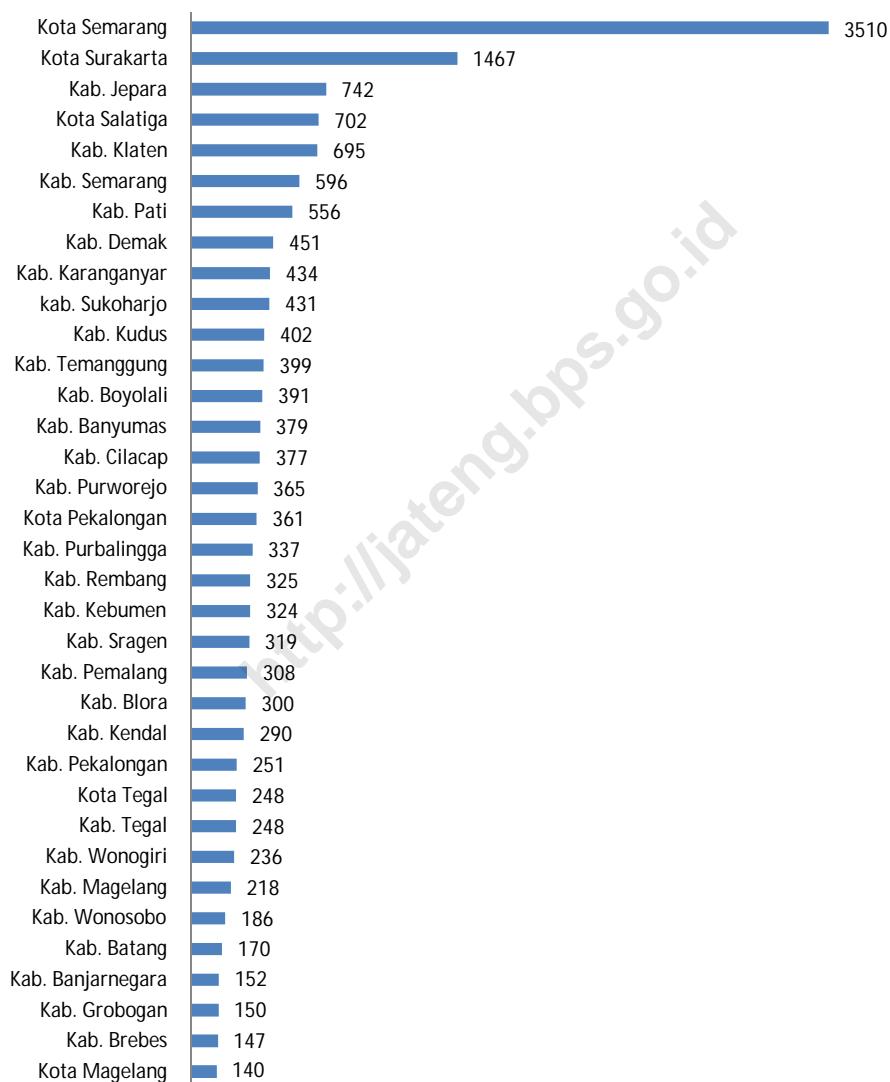
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*), dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*).

Berdasarkan laporan registrasi Polda Jawa Tengah, selama tahun 2012 tercatat sebanyak 19.094 kasus tindak kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat. Jumlah kejadian tindak kriminalitas tersebut pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebanyak 17.803 kasus dan terus menurun menjadi sebanyak 16.611 kasus pada tahun 2014 (lihat lampiran Tabel 21). Laporan Polda Jawa Tengah juga mengungkapkan bahwa keberhasilan Polri menekan jumlah tindak kriminalitas selama tahun 2014 tidak terlepas dari peranan Polri yang berupaya meningkatkan kinerjanya, dapat dilihat dari jumlah Polsek/Polsekta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 543 Polsek/Polsekta (lampiran Tabel 19). Di lain pihak, meningkatnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan stabilitas perekonomian nasional turut menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Gambar 11 menyajikan jumlah kejadian tindak kriminalitas atau *crime total* selama tahun 2014, berkisar antara 140 – 3.510 kasus. Dari Gambar 11 nampak bahwa lima kabupaten/kota yang paling rawan terhadap tindak kejahatan atau memiliki angka *crime total* paling tinggi selama tahun 2014

berturut-turut adalah Kota Semarang (3.510 kasus), Kota Surakarta (1.467 kasus), Kabupaten Jepara (742 kasus), Kota Salatiga (702 kasus) dan Kabupaten Klaten (695 kasus).

Gambar 11. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota, 2014

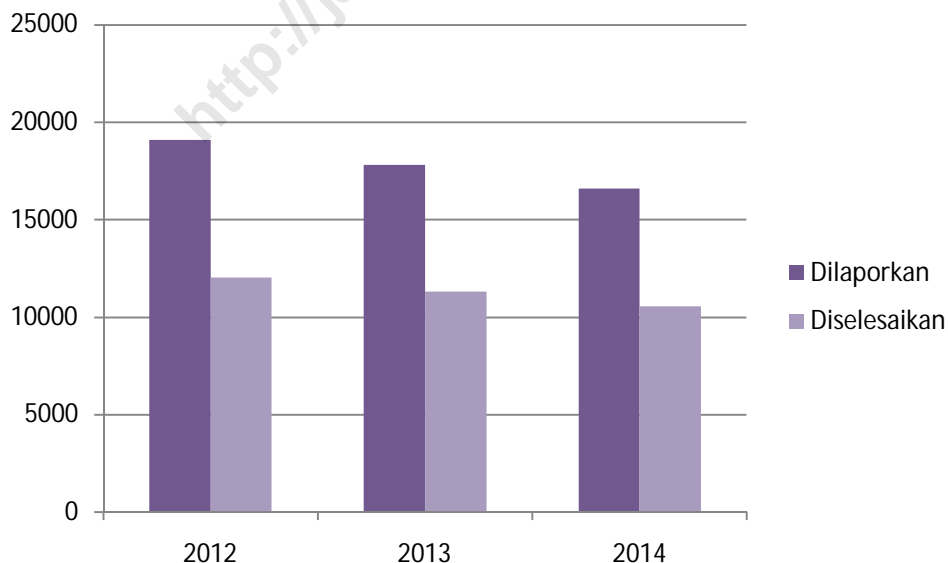


Sumber: Polda Jawa Tengah

Sebaliknya lima kabupaten/kota yang paling aman terhadap tindak kejahatan atau memiliki angka *crime total* paling rendah selama tahun 2013 berturut-turut adalah Kota Magelang (140 kasus), Kabupaten Brebes (147 kasus), Kabupaten Grobogan (150 kasus), Kabupaten Banjarnegara (152 kasus), Kabupaten Batang (170 kasus).

Seperti yang disajikan pada lampiran Tabel 19, angka *crime rate* di Jawa Tengah pada tahun 2014 mencapai 5,0 yang berarti bahwa dari setiap 10.000 orang penduduk di Jawa Tengah, sebanyak 5 orang mempunyai risiko terkena tindak kejahatan. Selama periode 2012-2014, indikator *crime rate* ini juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa dengan indikator *crime total*. Angka *crime rate* selama tahun 2014 menurun bila dibandingkan dengan angka *crime rate* tahun 2013 yang mencapai sekitar 5,4. Penurunan angka *crime rate* pada tahun 2014 juga terjadi di 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah (lihat lampiran Tabel 22).

Gambar 12. Jumlah Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan, 2012 - 2014



Sumber: Polda Jawa Tengah

Secara absolut, jumlah tindak pidana yang diselesaikan pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 11.304 kasus pada tahun 2013 menjadi 10.554 kasus tahun 2014. Demikian pula bila dilihat secara persentase, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan mengalami penurunan, yakni sekitar 63,49 persen pada tahun 2013 menjadi sekitar 63,48 persen tahun 2014 (lihat lampiran Tabel 20).

Salah satu aspek penting dari peristiwa tindak kejahatan adalah intensitas kejadian tindak kejahatan yang biasa diukur dengan menggunakan indikator *crime clock*. Indikator ini menunjukkan selang waktu atau interval waktu antara satu kejadian tindak kejahatan dengan kejadian berikutnya, misalnya *crime clock* sebesar dua jam menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap selang waktu dua jam terjadi satu tindak kriminalitas. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kejadian tindak kriminalitas, angka *crime clock* akan semakin rendah. Seperti yang disajikan dalam Tabel 20, angka *crime clock* di Jawa Tengah pada tahun 2014 adalah 0:31:39 yang berarti bahwa setiap 31 menit 39 detik terjadi satu peristiwa tindak kriminalitas.

4.2 Jumlah Orang yang Terlibat Tindak Kejahatan

Data dari Polda Jawa Tengah mengungkapkan bahwa jumlah aksi tindak kriminalitas yang terjadi selama tahun 2014 dilakukan oleh sebanyak 11.855 orang pelaku. Sejalan dengan pendapat para kriminolog yang menyebutkan bahwa dunia kriminalitas adalah dunia laki-laki, sebagian besar dari pelaku tindak pidana adalah laki-laki. Tabel 26 menunjukkan bahwa pada tahun 201, dari total pelaku tindak pidana, sebanyak 11.703 orang pelaku kejahatan (98,72 persen) adalah laki-laki dan 152 orang lainnya (1,28 persen) perempuan.

Komposisi umur pelaku tindak pidana seperti disajikan dalam Tabel 26 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku tindak pidana adalah orang dewasa yaitu mereka yang telah berusia 16 tahun atau lebih (sekitar 97,76 persen) dan hanya sebagian kecil lainnya masih tergolong anak-anak (2,23 persen).

Sebaran jumlah pelaku tindak kriminalitas menurut kabupaten/kota selama tahun 2014 bervariasi antar kabupaten/kota. Tabel 26 menunjukkan bahwa selama tahun 2014 jumlah pelaku kriminalitas paling banyak ditemukan di Kota Semarang (1.457 orang), Kota Surakarta (1.051 orang) dan Kabupaten Klaten (713 orang). Sebaliknya jumlah pelaku kriminalitas yang paling sedikit ditemukan di Kabupaten Brebes (108 orang), Kota Magelang (111 orang), dan Kota Tegal (165 orang).

4.3. Jenis Tindak Pidana

Peristiwa tindak kriminalitas yang terjadi di wilayah Jawa Tengah secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Tabel A menunjukkan bahwa selama tahun 2014 kejahatan konvensional merupakan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi dan dilaporkan, tercatat sebanyak 16.310 kasus dan sekitar 62,84 persen (10.249 kasus) diantaranya telah diselesaikan. Selain itu juga terjadi jenis kejahatan terhadap kekayaan negara, dilaporkan sejumlah 300 kasus kejahatan dan 98,00 persen (294 kasus) diantaranya telah berhasil diselesaikan.

Tabel A Jumlah Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Jenis Kejahatan, 2014

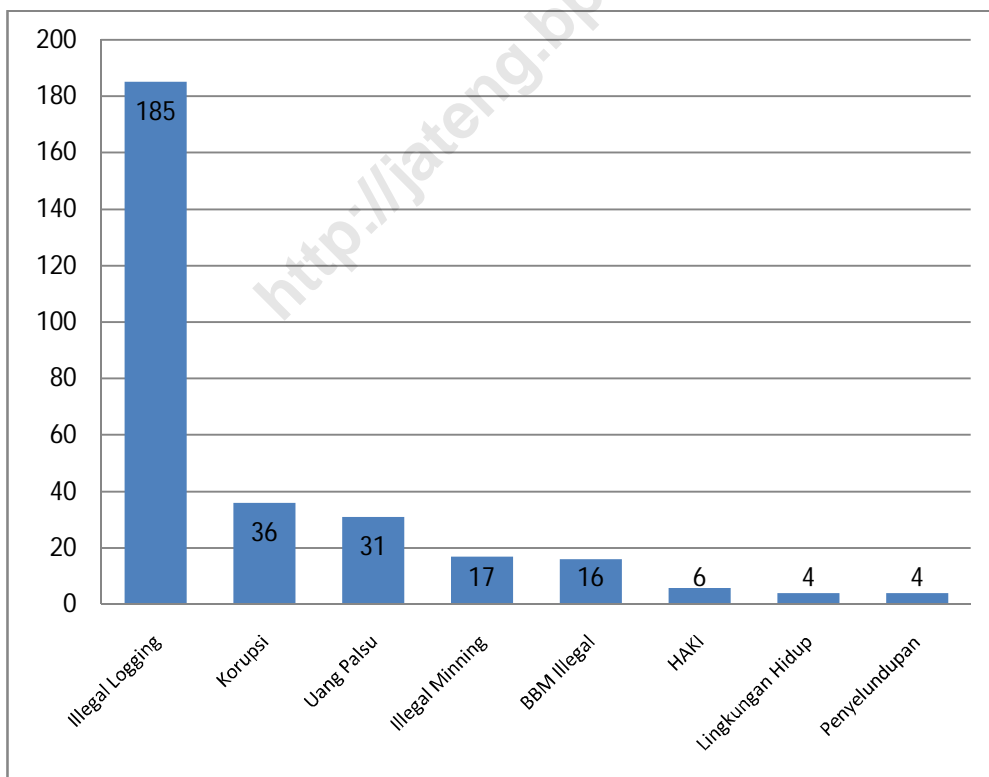
No	Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kejahatan Konvensional	16 310	10 249	62,84
2	Kejahatan Transnasional	1	1	100,00
3	Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	300	294	98,00
4	Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi	0	0	0,00
5	Kejahatan HAM	0	0	0,00
Jumlah		16 611	10 544	63,48

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 26 mencatat bahwa jenis kejahatan konvensional yang sering terjadi dan dilaporkan selama tahun 2014, antara lain: pencurian dengan pemberatan (currat) sebanyak 2.439 kasus (14,95 persen), pencurian kendaraan bermotor roda dua (curranmor R2) sebanyak 1.847 kasus (11,32 persen) dan penipuan sebanyak 1.681 kasus (10,31 persen). Dari jumlah tersebut, 1.346 kasus currat, 490 kasus curranmor R2, dan 737 kasus penipuan telah berhasil diselesaikan.

Kasus illegal logging merupakan jenis kasus kejahatan terhadap kekayaan negara yang paling banyak terjadi selama tahun 2014, tercatat sebanyak 185 kasus (sekitar 61,67 persen) dari total 300 kasus kejahatan terhadap kekayaan negara, disusul kasus korupsi sebanyak 36 kasus (12 persen), dan kasus uang palsu tercatat 31 kasus (10,33 persen).

Gambar 13. Jumlah Perkara Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara 2014



Sumber: Polda Jawa Tengah

LAMPIRAN

<http://jateng.go.id>

Tabel 1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2014

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	2 138,51	24	284	1 685 573
2	Kab. Banyumas	1 327,59	27	331	1 620 918
3	Kab. Purbalingga	777,65	18	239	889 214
4	Kab. Banjarnegara	1 069,74	20	278	895 986
5	Kab. Kebumen	1 282,74	26	460	1 181 006
6	Kab. Purworejo	1.034,82	16	494	708 038
7	Kab. Wonosobo	984,68	15	265	773 280
8	Kab. Magelang	1 085,73	21	372	1 233 695
9	Kab. Boyolali	1.015,07	19	267	957 857
10	Kab. Klaten	655,56	26	401	1 154 040
11	Kab. Sukoharjo	466,66	12	167	856 937
12	Kab. Wonogiri	1 822,37	25	294	945 817
13	Kab. Karanganyar	772,20	17	177	848 255
14	Kab. Sragen	946,49	20	208	875 600
15	Kab. Grobogan	1 795,85	19	280	1 343 960
16	Kab. Blora	1 794,40	16	295	848 369
17	Kab. Rembang	1 014,10	14	294	614 087
18	Kab. Pati	1 491,20	21	406	1 225 594
19	Kab. Kudus	425,17	9	132	821 136
20	Kab. Jepara	1 004,16	16	195	1 170 797
21	Kab. Demak	897,43	14	249	1 106 328
22	Kab. Semarang	946,86	19	235	987 557
23	Kab. Temanggung	870,23	20	289	738 915
24	Kab. Kendal	1 002,27	20	286	934 643
25	Kab. Batang	788,95	15	248	736 397
26	Kab. Pekalongan	836,13	19	285	867 573
27	Kab. Pemasang	1 011,90	14	222	1 284 236
28	Kab. Tegal	879,70	18	287	1 420 132
29	Kab. Brebes	1 657,73	17	297	1 773 379
30	Kota Magelang	18,12	3	17	120 373
31	Kota Surakarta	44,03	5	51	510 077
32	Kota Salatiga	52,96	4	22	181 193
33	Kota Semarang	373,67	16	177	1 672 999
34	Kota Pekalongan	44,96	4	47	293 704
35	Kota Tegal	34,49	4	27	244 998
	Provinsi Jawa Tengah	32 544,12	573	8 578	33 522 663

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

*) Hasil Proyeksi BPS Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SP2010

Tabel 2 Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Menggunakan Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2014

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2014		
		Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	1 476 371	964 687	65,34
2	Kab. Banyumas	1 324 314	940 902	71,05
3	Kab. Purbalingga	725 159	529 551	73,03
4	Kab. Banjarnegara	761 908	548 685	72,01
5	Kab. Kebumen	1 041 825	700 684	67,26
6	Kab. Purworejo	629 860	436 246	69,26
7	Kab. Wonosobo	656 243	493 562	75,21
8	Kab. Magelang	959 133	783 541	81,69
9	Kab. Boyolali	799 596	638 399	79,84
10	Kab. Klaten	1 007 729	763 094	75,72
11	Kab. Sukoharjo	676 540	510 238	75,42
12	Kab. Wonogiri	908 304	600 715	66,14
13	Kab. Karanganyar	685 818	534 511	77,94
14	Kab. Sragen	775 333	566 690	73,09
15	Kab. Grobogan	1 096 951	785 296	71,59
16	Kab. Blora	700 629	535 717	76,46
17	Kab. Rembang	480 287	404 628	84,25
18	Kab. Pati	1 026 620	757 487	73,78
19	Kab. Kudus	600 872	488 920	81,37
20	Kab. Jepara	839 147	670 415	79,89
21	Kab. Demak	835 139	647 002	77,47
22	Kab. Semarang	750 083	602 170	80,28
23	Kab. Temanggung	582 524	492 438	84,54
24	Kab. Kendal	763 527	594 252	77,83
25	Kab. Batang	584 444	454 707	77,80
26	Kab. Pekalongan	709 185	513 186	72,36
27	Kab. Pemasang	1 104 650	710 508	64,32
28	Kab. Tegal	1 193 961	765 591	64,12
29	Kab. Brebes	1 487 556	955 511	64,23
30	Kota Magelang	94 397	75 280	79,75
31	Kota Surakarta	414 802	315 179	75,98
32	Kota Salatiga	130 007	107 792	82,91
33	Kota Semarang	1 126 304	845 955	75,11
34	Kota Pekalongan	218 657	173 797	79,48
35	Kota Tegal	200 039	137 199	68,59
	Provinsi Jawa Tengah	27 367 914	20 044 535	73,24

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3 Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilu Legislatif 2014 untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2014 Pemilihan DPR RI		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	904 868	59 819	964 687
2	Kab. Banyumas	869 262	71 640	940 902
3	Kab. Purbalingga	457 082	72 469	529 551
4	Kab. Banjarnegara	485 861	62 824	548 685
5	Kab. Kebumen	632 632	68 052	700 684
6	Kab. Purworejo	395 384	40 862	436 246
7	Kab. Wonosobo	410 148	83 414	493 562
8	Kab. Magelang	706 981	76 560	783 541
9	Kab. Boyolali	574 204	64 195	638 399
10	Kab. Klaten	682 743	80 351	763 094
11	Kab. Sukoharjo	463 063	47 175	510 238
12	Kab. Wonogiri	557 484	43 231	600 715
13	Kab. Karanganyar	478 979	55 532	534 511
14	Kab. Sragen	491 671	75 019	566 690
15	Kab. Grobogan	678 346	106 950	785 296
16	Kab. Blora	430 700	105 017	535 717
17	Kab. Rembang	310 325	94 303	404 628
18	Kab. Pati	652 561	104 926	757 487
19	Kab. Kudus	428 791	60 129	488 950
20	Kab. Jepara	602 451	67 964	670 415
21	Kab. Demak	548 578	98 424	647 002
22	Kab. Semarang	529 162	73 008	602 170
23	Kab. Temanggung	437 357	55 081	492 438
24	Kab. Kendal	486 236	108 016	594 252
25	Kab. Batang	369 046	85 661	454 707
26	Kab. Pekalongan	428 715	84 471	513 186
27	Kab. Pemasang	618 513	91 995	710 508
28	Kab. Tegal	666 008	99 583	765 591
29	Kab. Brebes	855 193	100 318	955 511
30	Kota Magelang	64 445	10 835	75 280
31	Kota Surakarta	290 818	24 361	315 179
32	Kota Salatiga	92 579	15 213	107 792
33	Kota Semarang	751 127	94 828	845 955
34	Kota Pekalongan	137 372	36 425	173 797
35	Kota Tegal	114 774	22 425	137 199
Provinsi Jawa Tengah		17 603 459	2 441 076	20 044 535

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4 Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilu Legislatif 2014 untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2014 Pemilihan DPD		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	839 221	125 466	964 687
2	Kab. Banyumas	768 542	172 360	940 902
3	Kab. Purbalingga	346 277	183 274	529 551
4	Kab. Banjarnegara	403 944	144 741	548 685
5	Kab. Kebumen	532 545	168 139	700 684
6	Kab. Purworejo	348 355	87 891	436 246
7	Kab. Wonosobo	334 601	158 961	493 562
8	Kab. Magelang	569 081	214 460	783 541
9	Kab. Boyolali	456 368	182 031	638 399
10	Kab. Klaten	545 871	217 223	763 094
11	Kab. Sukoharjo	386 220	124 018	510 238
12	Kab. Wonogiri	508 369	92 346	600 715
13	Kab. Karanganyar	391 310	143 201	534 511
14	Kab. Sragen	418 094	148 569	566 690
15	Kab. Grobogan	569 742	215 554	785 296
16	Kab. Blora	356 735	178 982	535 717
17	Kab. Rembang	221 296	183 332	404 628
18	Kab. Pati	465 787	291 700	757 487
19	Kab. Kudus	293 257	195 663	488 950
20	Kab. Jepara	502 734	167 681	670 415
21	Kab. Demak	411 935	235 067	647 002
22	Kab. Semarang	420 229	181 941	602 170
23	Kab. Temanggung	385 126	107 312	492 438
24	Kab. Kendal	355 686	238 566	594 252
25	Kab. Batang	274 508	180 199	454 707
26	Kab. Pekalongan	312 026	201 160	513 186
27	Kab. Pemasang	505 756	204 752	710 508
28	Kab. Tegal	530 613	234 978	765 591
29	Kab. Brebes	705 307	250 204	955 511
30	Kota Magelang	51 486	23 794	75 280
31	Kota Surakarta	241 707	73 472	315 179
32	Kota Salatiga	77 057	30 735	107 792
33	Kota Semarang	647 247	198 708	845 955
34	Kota Pekalongan	99 811	73 986	173 797
35	Kota Tegal	91 574	45 625	137 199
Provinsi Jawa Tengah		14 368 417	5 676 118	20 044 535

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 5 Jumlah Suara Sah, dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilu Legislatif 2014 untuk Memilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2014 Pemilihan DPRD Provinsi		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	896 486	68 201	964 687
2	Kab. Banyumas	851 211	89 691	940 902
3	Kab. Purbalingga	427 518	102 033	529 551
4	Kab. Banjarnegara	465 749	82 936	548 685
5	Kab. Kebumen	596 464	104 220	700 684
6	Kab. Purworejo	386 932	49 314	436 246
7	Kab. Wonosobo	397 763	95 799	493 562
8	Kab. Magelang	679 614	103 927	783 541
9	Kab. Boyolali	547 418	90 981	638 399
10	Kab. Klaten	652 886	110 208	763 094
11	Kab. Sukoharjo	443 840	66 398	510 238
12	Kab. Wonogiri	552 808	47 907	600 715
13	Kab. Karanganyar	453 513	80 998	534 511
14	Kab. Sragen	490 673	76 017	566 690
15	Kab. Grobogan	646 868	138 428	785 296
16	Kab. Blora	428 511	107 206	535 717
17	Kab. Rembang	298 454	106 174	404 628
18	Kab. Pati	615 464	142 023	757 487
19	Kab. Kudus	387 580	101 340	488 950
20	Kab. Jepara	582 537	87 878	670 415
21	Kab. Demak	532 330	114 672	647 002
22	Kab. Semarang	515 170	87 000	602 170
23	Kab. Temanggung	425 574	66 864	492 438
24	Kab. Kendal	471 758	122 494	594 252
25	Kab. Batang	360 133	94 574	454 707
26	Kab. Pekalongan	408 702	104 484	513 186
27	Kab. Pemasang	615 952	94 556	710 508
28	Kab. Tegal	630 502	135 089	765 591
29	Kab. Brebes	821 691	133 820	955 511
30	Kota Magelang	63 303	11 977	75 280
31	Kota Surakarta	282 809	32 370	315 179
32	Kota Salatiga	90 099	17 693	107 792
33	Kota Semarang	745 135	100 820	845 955
34	Kota Pekalongan	132 664	41 133	173 797
35	Kota Tegal	108 639	28 560	137 199
Provinsi Jawa Tengah		17 006 750	3 037 785	20 044 535

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6 Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2014 Menurut Daerah Pemilihan

Partai Politik	Perolehan Suara					
	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	79 297	106 428	126 298	40 979	69 973	89 448
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	202 999	196 735	278 638	103 710	105 183	356 340
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	138 035	85 189	115 157	146 879	138 654	106 489
PDI Perjuangan	561 038	226 018	377 984	545 073	903 456	449 331
Partai Golongan Karya (Golkar)	125 498	169 054	185 680	192 364	184 424	182 111
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	214 501	209 926	324 903	137 090	157 086	208 271
Partai Demokrat (PD)	167 850	78 583	238 220	121 084	97 194	169 566
Partai Amanat Nasional (PAN)	137 379	123 790	66 298	103 961	140 731	138 927
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	109 440	236 733	141 118	36 931	51 532	147 319
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	65 848	50 739	95 353	55 691	59 321	81 630
Partai Bulan Bintang (PBB)	10 492	15 099	19 085	8 197	13 331	15 236
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	9 785	4 153	20 563	5 035	6 068	8 518
Jumlah	1 822 162	1 502 447	1 989 297	1 496 994	1 926 953	1 953 186

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6 (lanjutan)

Partai POLitik	Perolehan Suara				Jumlah Suara Sah
	DAPIL 7	DAPIL 8	DAPIL 9	DAPIL 10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	79 632	51 561	58 819	60 549	762 984
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	190 229	234 435	310 606	280 490	2 259 365
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	129 975	91 218	118 428	77 522	1 147 546
PDI Perjuangan	320 887	501 736	378 084	412 306	4 675 913
Partai Golongan Karya (Golkar)	138 082	265 794	176 074	167 230	1 786 311
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	207 942	202 832	152 785	147 305	1 962 641
Partai Demokrat (PD)	98 575	115 044	107 697	84 806	1 278 619
Partai Amanat Nasional (PAN)	128 551	127 123	112 226	87 899	1 166 885
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	135 049	92 689	92 821	137 900	1 181 532
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	47 671	52 336	43 052	50 864	602 505
Partai Bulan Bintang (PBB)	9 300	8 066	6 629	6 828	112 263
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3 838	4 863	3 611	3 752	70 186
Jumlah	1 489 731	1 747 697	1 560 832	1 517 451	17 006 750

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7 Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin, Periode 2014 - 2019

Fraksi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
PDI Perjuangan	17	10	27
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	10	3	13
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	9	2	11
Partai Golongan Karya (Golkar)	6	4	10
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	10	0	10
Partai Demokrat (PD)	7	2	9
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6	2	8
Partai Amanat Nasional (PAN)	7	1	8
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	4	0	4
Jumlah	76	24	100

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Data bulan September 2014

Tabel 8 Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Kelompok Umur, Periode 2014 - 2019

Fraksi	Kelompok Umur				Jumlah
	21-35	36-49	50-59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDI Perjuangan	6	10	8	3	27
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	9	0	1	13
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1	7	3	0	11
Partai Golongan Karya (Golkar)	1	3	2	4	10
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	6	2	0	10
Partai Demokrat (PD)	1	6	1	1	9
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	3	4	0	8
Partai Amanat Nasional (PAN)	0	3	4	1	8
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	0	2	2	0	4
Jumlah	15	49	26	10	100

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Data bulan September 2014

Tabel 9 Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Pendidikan, Periode 2014 - 2019

Fraksi	Pendidikan					Jumlah
	SLTA	D1-D3	D4/S1	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDI Perjuangan	1	0	14	11	1	27
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	0	5	8	0	13
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	0	0	8	3	0	11
Partai Golongan Karya (Golkar)	0	0	3	7	0	10
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	1	5	1	0	10
Partai Demokrat (PD)	0	0	6	3	0	9
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	1	6	1	0	8
Partai Amanat Nasional (PAN)	0	0	6	1	1	8
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	0	0	1	3	0	4
Jumlah	4	2	54	38	2	100

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Data bulan September 2014

Tabel 10 Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Menggunakan Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014		
		Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	1 493 985	975 156	65,27
2	Kab. Banyumas	1 333 216	968 266	72,63
3	Kab. Purbalingga	731 258	510 579	69,82
4	Kab. Banjarnegara	763 305	526 415	68,97
5	Kab. Kebumen	1 042 620	687 672	65,96
6	Kab. Purworejo	632 476	434 024	68,62
7	Kab. Wonosobo	659 839	476 602	72,23
8	Kab. Magelang	965 390	767 911	79,54
9	Kab. Boyolali	806 819	609 377	75,53
10	Kab. Klaten	1 015 960	759 528	74,76
11	Kab. Sukoharjo	680 790	523 004	76,82
12	Kab. Wonogiri	910 007	607 328	66,74
13	Kab. Karanganyar	692 653	538 435	77,74
14	Kab. Sragen	775 600	550 403	70,96
15	Kab. Grobogan	1 105 862	734 289	66,40
16	Kab. Blora	704 487	504 505	71,61
17	Kab. Rembang	481 264	375 271	77,98
18	Kab. Pati	1 033 941	743 466	71,91
19	Kab. Kudus	607 610	460 705	75,82
20	Kab. Jepara	846 437	622 010	73,49
21	Kab. Demak	842 655	598 973	71,08
22	Kab. Semarang	759 051	595 873	78,50
23	Kab. Temanggung	582 486	485 608	83,37
24	Kab. Kendal	760 531	567 488	74,62
25	Kab. Batang	588 562	430 067	73,07
26	Kab. Pekalongan	715 372	481 479	67,30
27	Kab. Pemalang	1 123 549	692 539	61,64
28	Kab. Tegal	1 210 106	756 644	62,53
29	Kab. Brebes	1 506 629	927 895	61,59
30	Kota Magelang	95 418	75 585	79,21
31	Kota Surakarta	419 547	340 811	81,23
32	Kota Salatiga	132 872	108 664	81,78
33	Kota Semarang	1 161 687	927 941	79,88
34	Kota Pekalongan	220 713	167 356	75,83
35	Kota Tegal	203 366	136 535	67,14
Provinsi Jawa Tengah		27 606 063	19 668 404	71,25

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 11 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	967 115	8 041	518 829
2	Kab. Banyumas	959 571	8 695	364 950
3	Kab. Purbalingga	504 577	6 002	220 679
4	Kab. Banjarnegara	519 296	7 119	236 890
5	Kab. Kebumen	680 019	7 653	354 948
6	Kab. Purworejo	428 436	5 588	198 452
7	Kab. Wonosobo	465 595	11 007	183 237
8	Kab. Magelang	752 863	15 048	197 479
9	Kab. Boyolali	603 267	6 110	197 442
10	Kab. Klaten	751 666	7 862	256 432
11	Kab. Sukoharjo	517 315	5 689	157 786
12	Kab. Wonogiri	602 257	5 071	302 679
13	Kab. Karanganyar	532 711	5 724	154 218
14	Kab. Sragen	545 470	4 933	225 197
15	Kab. Grobogan	729 109	5 180	371 573
16	Kab. Blora	499 882	4 623	199 982
17	Kab. Rembang	371 847	3 424	105 993
18	Kab. Pati	737 562	5 904	290 475
19	Kab. Kudus	455 555	5 150	146 905
20	Kab. Jepara	617 151	4 859	224 427
21	Kab. Demak	593 802	5 171	243 682
22	Kab. Semarang	587030	8 843	163 178
23	Kab. Temanggung	476 330	9 278	96 878
24	Kab. Kendal	558 189	9 299	193 043
25	Kab. Batang	423 725	6 342	158 495
26	Kab. Pekalongan	476 837	4 642	233 893
27	Kab. Pemasang	686 161	6 378	431 010
28	Kab. Tegal	478 394	8 250	453 462
29	Kab. Brebes	919 081	8 814	578 734
30	Kota Magelang	74 229	1 356	19 833
31	Kota Surakarta	336 902	3 909	78 736
32	Kota Salatiga	107 292	1 372	24 208
33	Kota Semarang	916 785	11 156	233 746
34	Kota Pekalongan	164 552	2 804	53 357
35	Kota Tegal	134 687	1 848	66 831
Provinsi Jawa Tengah		19 445 260	223 144	7 937 659

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 12 Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Menggunakan Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2013

No	Kabupaten/Kota	Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	1 485 599	788 006	53,04
2	Kab. Banyumas	1 313 028	780 386	59,43
3	Kab. Purbalingga	726 217	427 555	58,87
4	Kab. Banjarnegara	759 499	428 138	56,37
5	Kab. Kebumen	1 054 587	605 199	57,39
6	Kab. Purworejo	634 296	372 028	58,65
7	Kab. Wonosobo	653 771	406 261	62,14
8	Kab. Magelang	959 332	684 139	71,31
9	Kab. Boyolali	810 118	497 289	61,38
10	Kab. Klaten	1 014 794	584 078	57,56
11	Kab. Sukoharjo	685 484	421 676	61,52
12	Kab. Wonogiri	919 901	519 721	56,50
13	Kab. Karanganyar	691 104	426 012	61,64
14	Kab. Sragen	782 756	407 914	52,11
15	Kab. Grobogan	1 098 827	503 010	45,78
16	Kab. Blora	704 896	393 872	55,88
17	Kab. Rembang	473 335	243 884	51,52
18	Kab. Pati	1 026 787	457 157	44,52
19	Kab. Kudus	600 448	475 941	79,26
20	Kab. Jepara	837 359	375 531	44,85
21	Kab. Demak	839 022	376 883	44,92
22	Kab. Semarang	749 397	461 375	61,57
23	Kab. Temanggung	578 508	479 530	82,89
24	Kab. Kendal	758 930	430 688	56,75
25	Kab. Batang	577 707	314 698	54,47
26	Kab. Pekalongan	704 852	330 838	46,94
27	Kab. Pemasang	1 102 735	515 664	46,76
28	Kab. Tegal	1 180 477	572 403	48,49
29	Kab. Brebes	1 488 243	663 624	44,59
30	Kota Magelang	94 302	62 904	66,70
31	Kota Surakarta	408 507	263 375	64,47
32	Kota Salatiga	128 620	88 340	68,68
33	Kota Semarang	1 125 696	691 709	61,45
34	Kota Pekalongan	216 381	102 678	47,45
35	Kota Tegal	200 470	108 762	54,25
Provinsi Jawa Tengah		27 385 985	15 261 268	55,73

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 13 Jumlah Pemilih, Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2013

No	Kabupaten/Kota	Pilkada Gubernur Jawa Tengah			
		Jumlah Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1 485 599	762 781	25 225	697 593
2	Kab. Banyumas	1 313 028	755 397	24 989	532 642
3	Kab. Purbalingga	726 217	404 227	23 328	298 662
4	Kab. Banjarnegara	759 499	402 150	25 988	331 361
5	Kab. Kebumen	1 054 587	578 121	27 078	449 388
6	Kab. Purworejo	634 296	353 306	18 722	262 268
7	Kab. Wonosobo	653 771	356 288	49 973	247 510
8	Kab. Magelang	959 332	615 608	68 531	275 193
9	Kab. Boyolali	810 118	475 267	22 022	312 829
10	Kab. Klaten	1 014 794	544 704	39 374	430 716
11	Kab. Sukoharjo	685 484	395 000	26 676	263 808
12	Kab. Wonogiri	919 901	499 639	20 082	400 180
13	Kab. Karanganyar	691 104	401 065	24 947	265 092
14	Kab. Sragen	782 756	390 643	17 271	374 842
15	Kab. Grobogan	1 098 827	491 610	11 400	595 817
16	Kab. Blora	704 896	367 478	26 394	311 024
17	Kab. Rembang	473 335	226 716	17 168	229 451
18	Kab. Pati	1 026 787	435 227	21 930	569 630
19	Kab. Kudus	600 448	404 719	71 222	124 507
20	Kab. Jepara	837 359	358 200	17 331	461 828
21	Kab. Demak	839 022	359 677	17 206	462 139
22	Kab. Semarang	749 397	423 020	38 355	288 022
23	Kab. Temanggung	578 508	435 144	44 386	98 987
24	Kab. Kendal	758 930	366 326	64 362	328 242
25	Kab. Batang	577 707	278 812	35 886	263 009
26	Kab. Pekalongan	704 852	306 832	24 006	374 014
27	Kab. Pemalang	1 102 735	494 805	20 859	587 071
28	Kab. Tegal	1 180 477	543 244	29 159	608 074
29	Kab. Brebes	1 488 243	640 125	23 499	824 619
30	Kota Magelang	94 302	53 658	9 246	31 398
31	Kota Surakarta	408 507	238 700	24 675	145 132
32	Kota Salatiga	128 620	78 453	9 887	40 280
33	Kota Semarang	1 125 696	637 249	54 460	433 987
34	Kota Pekalongan	216 381	87 620	15 058	113 703
35	Kota Tegal	200 470	98 134	10 628	91 708
Provinsi Jawa Tengah		27 385 985	14 259 945	1 001 323	12 124 717

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 14 Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir Kabupaten/Kota Selama 2010 - 2013

No	Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan	
		Gubernur	Bupati/Walikota
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap		09 September 2012
2	Kab. Banyumas		17 Februari 2013
3	Kab. Purbalingga		18 April 2010
4	Kab. Banjarnegara		24 Juli 2011
5	Kab. Kebumen		11 April 2010
6	Kab. Purworejo		31 Juli 2010
7	Kab. Wonosobo		02 Agustus 2010
8	Kab. Magelang		27 Oktober 2013
9	Kab. Boyolali		09 Mei 2010
10	Kab. Klaten		20 September 2010
11	Kab. Sukoharjo		03 Juni 2010
12	Kab. Wonogiri		16 September 2010
13	Kab. Karanganyar		22 September 2013
14	Kab. Sragen		19 Maret 2011
15	Kab. Grobogan		9 Januari 2011
16	Kab. Blora		03 Juni 2010
17	Kab. Rembang		26 April 2010
18	Kab. Pati		23 Juli 2011
19	Kab. Kudus		26 Mei 2013
20	Kab. Jepara		29 Januari 2012.
21	Kab. Demak		6 Maret 2011
22	Kab. Semarang		31 Juli 2010
23	Kab. Temanggung		26 Mei 2013
24	Kab. Kendal		06 Juni 2010
25	Kab. Batang		11 Desember 2011
26	Kab. Pekalongan		1 Mei 2011
27	Kab. Pemalang		31 Oktober 2010
28	Kab. Tegal		27 Oktober 2013
29	Kab. Brebes		7 Oktober 2012
30	Kota Magelang		06 Juni 2010
31	Kota Surakarta		26 April 2010
32	Kota Salatiga		08 Mei 2011
33	Kota Semarang		18 April 2010
34	Kota Pekalongan		16 Juni 2010.
35	Kota Tegal		27 Oktober 2013
Provinsi Jawa Tengah		26 Mei 2013	

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 15 Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Menggunakan Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Bupati/Walikota 2010 - 2013

No	Kabupaten/Kota	2010 - 2013		
		Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	1 498 215	942 242	62,89
2	Kab. Banyumas	1 315 267	871 926	66,29
3	Kab. Purbalingga	689 384	435 153	63,12
4	Kab. Banjarnegara	745 569	515 975	69,21
5	Kab. Kebumen (I)	973 723	614 967	63,16
	Putaran II	973 723	556 692	57,17
6	Kab. Purworejo (I)	633 806	398 489	62,87
	Putaran II	633 806	372 679	58,80
7	Kab. Wonosobo	624 996	453 522	72,56
8	Kab. Magelang	937 691	665 821	71,01
9	Kab. Boyolali	769 994	559 861	72,71
10	Kab. Klaten	1 015 775	673 748	66,33
11	Kab. Sukoharjo	657 774	433 020	65,83
12	Kab. Wonogiri	915 178	600 065	65,57
13	Kab. Karanganyar	684 593	486 405	71,05
14	Kab. Sragen	751 071	533 980	71,10
15	Kab. Grobogan	1 076 639	728 350	67,65
16	Kab. Blora	688 244	493 478	71,70
17	Kab. Rembang	458 795	345 602	75,33
18	Kab. Pati	1 019 280	678 900	66,61
19	Kab. Kudus	600 195	475 814	79,28
20	Kab. Jepara	825 402	538 739	65,27
21	Kab. Demak	805 661	522 236	64,82
22	Kab. Semarang	735 418	489 405	66,55
23	Kab. Temanggung	578 446	479 473	82,89
24	Kab. Kendal	732 017	515 070	70,36
25	Kab. Batang	569 723	437 318	76,76
26	Kab. Pekalongan	683 869	465 262	68,03
27	Kab. Pemasang	1 052 133	595 739	56,62
28	Kab. Tegal	1 183 537	685 280	57,90
29	Kab. Brebes	1 471 123	893 487	60,74
30	Kota Magelang	94 850	67 370	71,03
31	Kota Surakarta	393 703	282 689	71,80
32	Kota Salatiga	124 309	102 003	82,06
33	Kota Semarang	1 100 337	660 851	60,06
34	Kota Pekalongan	209 935	147 034	70,04
35	Kota Tegal	196 339	118 421	60,31

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 16 Jumlah Pemilih, Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilkada Bupati/Walikota 2010 - 2013

No	Kabupaten/Kota	Pilkada Bupati/Walikota			
		Jumlah Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1 498 215	913 606	28 636	555 973
2	Kab. Banyumas	1 315 267	828 619	43 307	443 341
3	Kab. Purbalingga	689 384	383 443	51 710	254 231
4	Kab. Banjarnegara	745 569	497 461	18 514	229 594
5	Kab. Kebumen (Putaran I)	973 723	592 168	22 789	358 766
	(Putaran II)	973 723	535 817	20 875	414 031
6	Kab. Purworejo (Putaran I)	633 806	375 506	22 983	235 317
	(Putaran II)	633 806	347 656	25 023	261 127
7	Kab. Wonosobo	624 996	412 376	41 146	171 474
8	Kab. Magelang	937 691	607 923	57 898	271 870
9	Kab. Boyolali	769 994	540 192	19 669	210 133
10	Kab. Klaten	1 015 775	618 245	55 503	342 085
11	Kab. Sukoharjo	657 774	404 618	28 402	224 754
12	Kab. Wonogiri	915 178	586 288	13 777	315 113
13	Kab. Karanganyar	684 593	472 696	13 709	198 188
14	Kab. Sragen	751 071	524 341	9 639	217 091
15	Kab. Grobogan	1 076 639	715 884	12 466	348 289
16	Kab. Blora	688 244	480 437	13 041	194 766
17	Kab. Rembang	458 795	334 345	11 257	113 193
18	Kab. Pati	1 019 280	660 806	18 094	340 380
19	Kab. Kudus	600 195	456 204	19 610	124 381
20	Kab. Jepara	825 402	522 988	15 751	286 663
21	Kab. Demak	805 661	507 720	14 516	283 425
22	Kab. Semarang	735 418	459 018	30 387	246 013
23	Kab. Temanggung	578 446	444 194	35 279	98 973
24	Kab. Kendal	732 017	479 195	35 875	216 947
25	Kab. Batang	569 723	423 530	13 788	132 405
26	Kab. Pekalongan	683 869	449 050	16 212	218 607
27	Kab. Pemasaran	1 052 133	567 935	27 804	456 394
28	Kab. Tegal	1 183 537	662 740	22 540	498 257
29	Kab. Brebes	1 471 123	872 032	21 455	577 636
30	Kota Magelang	94 850	62 419	4 951	27 480
31	Kota Surakarta	393 703	275 549	7 140	111 014
32	Kota Salatiga	124 309	98 378	3 625	22 306
33	Kota Semarang	1 100 337	616 480	44 371	439 486
34	Kota Pekalongan	209 935	139 332	7 702	62 901
35	Kota Tegal	196 339	109 809	8 612	77 918

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 17 Perolehan Suara Kepala Daerah dan Partai Pengusungnya, 2010-2013

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kandidat	Perolehan Suara Sah		Partai Pendukung
			Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	2	555 044	60,75	Golkar, PAN, Hanura, PKPB
2	Kab. Banyumas	6	368 798	44,51	PDIP; PPP
3	Kab. Purbalingga	3	235 158	57,59	PDIP; PAN; PKS; PKB
4	Kab. Banjarnegara	4	199 065	40,02	P. Golkar, PDIP, PPP, PKS, P. Gerindra, PKNU, P. Hanura, PBR, PPRN, P. Barnas
5	Kab. Kebumen (I)	4	174 163	29,41	PAN;PPP;PKNU;Gerindra
	Putaran II	2	272 779	50,91	PAN;PPP;PKNU;Gerindra
6	Kab. Purworejo (I)	9	71 039	18,92	PAN; PPP; PPI; P.Pelopor
	Putaran II	2	185 847	53,46	P. GOLKAR
7	Kab. Wonosobo	5	221 698	51,34	PKB; P. GOLKAR; PPP
8	Kab. Magelang	6	206 057	33,90	PDIP
9	Kab. Boyolali	4	240 682	44,55	PDIP;PKB
10	Kab. Klaten	3	397 106	64,23	PDIP; PKS; P.Demokrat
11	Kab. Sukoharjo	3	199 612	49,33	PDIP
12	Kab. Wonogiri	4	236 645	40,36	PAN; Gerindra; PPP
13	Kab. Karanganyar	3	243 168	51,44	GOLKAR, PKS, PKPI, Gerindra
14	Kab. Sragen	5	265 648	50,66	P.GOLKAR, PAN, PPP
15	Kab. Grobogan	4	296 047	41,35	P.GOLKAR
16	Kab. Blora	3	243 715	59,73	Demokrat; PPP;PKB;Hanura; PPIB;PDIP
17	Kab. Rembang	5	187 106	55,96	P.Demokrat
18	Kab. Pati (II)	6	256 705	38,85	PKS, PKB, PPP, PPI, Gerindra, Hanura, PKPB
19	Kab. Kudus	5	220 448	48,33	PDI-P, PPP, Gerindra, PPPI, Partai Pelopor, PAN, PKS
20	Kab. Jepara	4	222 213	42,29	PPP, PAN, PKPI, Barnas
21	Kab. Demak	4	377 644	74,38	PKB; P. GOLKAR, PPP, PKS
22	Kab. Semarang	3	205 382	44,74	PDIP; P.Demokrat; PAN; P.Hanura
23	Kab. Temanggung	5	125 549	40,95	PDIP
24	Kab. Kendal	5	207 116	43,22	PDIP
25	Kab. Batang	3	171 184	40,42	P. Golkar, PPP, PAN, PDP, PPRN, PKNU, P. Pelopor, P. Barnas, PBR, PNIM, P. Republikan, P. Demokrat
26	Kab. Pekalongan	4	254 762	56,73	P. Demokrat, PKNU, PPP dan P. Gerindra
27	Kab. Pemalang	4	264 224	46,52	PDIP
28	Kab. Tegal	5	233 313	35,21	PKB
29	Kab. Brebes	2	452 210	51,85	PDIP
30	Kota Magelang	4	27 170	43,53	PDIP; PAN; PKS
31	Kota Surakarta	2	248 243	90,09	PDIP
32	Kota Salatiga	4	42 396	43,10	PKPI, PRN
33	Kota Semarang	5	211 323	34,28	PDIP
34	Kota Pekalongan	3	53 963	53,08	P.GOLKAR
35	Kota Tegal	4	35 006	45,23	P. GOLKAR
Provinsi (Gubernur)		3	6 962 417	48,82	PDIP

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 18 Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Jabatan Sebelumnya dan Tanggal Pelantikan, Periode 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Nama Bupati/Walikota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	H. Tatto Suwanto Pamuji	Laki-laki	STM
2	Kab. Banyumas	Ir. Achmad Husein	Laki-laki	S1
3	Kab. Purbalingga	Drs. H. Heru Sudjtmoko, M.Si	Laki-laki	S2
4	Kab. Banjarnegara	H. Sutedjo Slamet Utomo, SH, M.Hum	Laki-laki	S2
5	Kab. Kebumen	H. Buyar Winarso, S.E	Laki-laki	S1
6	Kab. Purworejo	Drs. Mahsun Zain, M.Ag	Laki-laki	S2
7	Kab. Wonosobo	Drs. H. Abdul Kholiq Arif, M.Si	Laki-laki	S2
8	Kab. Magelang	Zaenal Arifin, S.IP	Laki-laki	S1
9	Kab. Boyolali	Drs. Seno Samodro	Laki-laki	S1
10	Kab. Klaten	H. Sunarna, S.E, M.Hum	Laki-laki	S2
11	Kab. Sukoharjo	Wardoyo Wijaya, SH, MH	Laki-laki	S2
12	Kab. Wonogiri	H. Danar Rahmanto	Laki-laki	SMU
13	Kab. Karanganyar	Drs. H. Juliyatmono, MM	Laki-laki	S2
14	Kab. Sragen	Agus Fatchur Rahman, SH, MH	Laki-laki	S2
15	Kab. Grobogan	H. Bambang Pudjiono, SH	Laki-laki	S1
16	Kab. Blora	Djoko Nugroho	Laki-laki	Akmil
17	Kab. Rembang	H. Moch. Salim	Laki-laki	SLTA
18	Kab. Pati	H. Haryanto	Laki-laki	S2
19	Kab. Kudus	H. Musthofa	Laki-laki	S2
20	Kab. Jepara	Ahmad Marzuqi	Laki-laki	S1
21	Kab. Demak	Drs. H.M. Dachirin Said, SH, M.Si	Laki-laki	S2
22	Kab. Semarang	Dr. Mudjirin, S.E, Sp.OG	Laki-laki	S3
23	Kab. Temanggung	Drs. H. Mulyadi Bambang Sukarno	Laki-laki	S1
24	Kab. Kendal	dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM	Perempuan	S2
25	Kab. Batang	Yoyok Riyo Sudiby	Laki-laki	Akmil
26	Kab. Pekalongan	Drs. H. Amat Antono, M.Si	Laki-laki	S2
27	Kab. Pemalang	H. Junaedi, S.H, M.M	Laki-laki	S2
28	Kab. Tegal	Enthus Susmono	Laki-laki	SMA
29	Kab. Brebes	Hj. Idza Priyanti, SE	Perempuan	D3
30	Kota Magelang	Ir. Sigit Widyonindito, MT	Laki-laki	S2
31	Kota Surakarta	F.X. Hadi Rudyatmo	Laki-laki	SMA
32	Kota Salatiga	Yuliyanto, S.E, M.M	Laki-laki	S2
33	Kota Semarang	Drs. Soemarmo HS, M. Si	Laki-laki	S2
34	Kota Pekalongan	dr. Mohammad Basyir Ahmad	Laki-laki	S1
35	Kota Tegal	Hj. Siti Mashita Soeparno	Perempuan	Diploma
	Gubernur	H. Ganjar Pranowo	Laki-laki	S1

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 18 (Lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Jabatan/Pekerjaan sebelumnya	Tanggal Pelantikan
(1)	(2)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	Bupati Cilacap 2007-2012	19 November 2012
2	Kab. Banyumas	Wakil Bupati Banyumas	11 April 2013
3	Kab. Purbalingga	Wakil Bupati Purbalingga	27 Juli 2010
4	Kab. Banjarnegara	Pensiunan PNS Pemkab Banjarnegara	18 Oktober 2011
5	Kab. Kebumen	Pengusaha/Wiraswasta	26 Juli 2010
6	Kab. Purworejo	Wakil Bupati	30 Oktober 2010
7	Kab. Wonosobo	Bupati Wonosobo 2005-2010	30 Oktober 2010
8	Kab. Magelang	Anggota DPRD Kab. Magelang	29 Januari 2014
9	Kab. Boyolali	Wakil Bupati Boyolali	3 Agustus 2010
10	Kab. Klaten	Wiraswasta	2 Desember 2010
11	Kab. Sukoharjo	Ketua DPRD Sukoharjo	1 September 2010
12	Kab. Wonogiri	Pengusaha	1 November 2010
13	Kab. Karanganyar	Wakil Ketua DPRD Karanganyar 2009-2014	15 Desember 2013
14	Kab. Sragen	Wakil Bupati Sragen	4 Mei 2011
15	Kab. Grobogan	Bupati <i>incombent</i>	13 Maret 2011
16	Kab. Blora	Dandim 0720 Rembang	11 Agustus 2010
17	Kab. Rembang	Bupati Rembang 2005-2010	20 Juli 2010
18	Kab. Pati	Plt. Sekda Kab. Pati	Agustus 2012
19	Kab. Kudus	Wakil Bupati	14 Agustus 2013
20	Kab. Jepara	Wakil Bupati 2007-2012	21 Maret 2012
21	Kab. Demak	Bupati Demak	10 September 2012
22	Kab. Semarang	Direktur RSUD Bina Kasih Ambarawa	28 September 2010
23	Kab. Temanggung	Ketua DPRD Kab. Temanggung periode 2010 s/d 2014	29 Juli 2013
24	Kab. Kendal	Anggota DPRD Kab. Kendal	23 Agustus 2010
25	Kab. Batang	Pengusaha	13 Februari 2012
26	Kab. Pekalongan	Ka. Bakorwil II	27 Juni 2011
27	Kab. Pemalang	Wakil Bupati Pemalang	24 Januari 2011
28	Kab. Tegal	Seniman/Dalang Wayang Kulit	8 Januari 2014
29	Kab. Brebes	Wakil Bupati; Dir. PO. Dewi Sri	4 Desember 2012
30	Kota Magelang	PNS	30 Agustus 2010
31	Kota Surakarta	Walikota Surakarta 2005-2010	19 Oktober 2011
32	Kota Salatiga	Naggota DPRD Kota Salatiga	11 Juli 2011
33	Kota Semarang	PNS Pemkot Semarang	19 Juli 2010
34	Kota Pekalongan	Walikota Pekalongan 2005-2010	9 Agustus 2010
35	Kota Tegal	Swasta	23 Maret 2014
	Gubernur	Anggota DPR RI 2009-2014	23 Agustus 2013

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 19 Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja
2014**

No	Kabupaten/Kota	Polrestabes	Polres/Polresta	Polsek/Polsekta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	0	1	25
2	Kab. Banyumas	0	1	27
3	Kab. Purbalingga	0	1	16
4	Kab. Banjarnegara	0	1	20
5	Kab. Kebumen	0	1	26
6	Kab. Purworejo	0	1	16
7	Kab. Wonosobo	0	1	14
8	Kab. Magelang	0	1	21
9	Kab. Boyolali	0	1	19
10	Kab. Klaten	0	1	24
11	Kab. Sukoharjo	0	1	12
12	Kab. Wonogiri	0	1	25
13	Kab. Karanganyar	0	1	17
14	Kab. Sragen	0	1	20
15	Kab. Grobogan	0	1	14
16	Kab. Blora	0	1	16
17	Kab. Rembang	0	1	14
18	Kab. Pati	0	1	20
19	Kab. Kudus	0	1	9
20	Kab. Jepara	0	1	14
21	Kab. Demak	0	1	14
22	Kab. Semarang	0	1	16
23	Kab. Temanggung	0	1	14
24	Kab. Kendal	0	1	16
25	Kab. Batang	0	1	12
26	Kab. Pekalongan	0	1	15
27	Kab. Pemasang	0	1	14
28	Kab. Tegal	0	1	18
29	Kab. Brebes	0	1	17
30	Kota Magelang	0	1	3
31	Kota Surakarta	0	1	5
32	Kota Salatiga	0	1	4
33	Kota Semarang	1	0	15
34	Kota Pekalongan	0	1	6
35	Kota Tegal	0	1	5
Provinsi Jawa Tengah		1	34	543

Sumber: Polda Jawa Tengah

**Tabel 20 Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas Menurut Jenis Indikator
2012 – 2014**

Jenis Indikator	Tahun		
	2012 ^{r)}	2013 ^{r)}	2014
(1)	(2)	(3)	(3)
Jumlah Tindak Pidana (<i>Crime Total</i>)	19 094	17 803	16 611
Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	12 039	11 304	10 554
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clearance Rate</i>)	63,05	63,5	63,48
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	0:27:36	0:29:31	0:31:39
Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>)	5,7	5,4	5,0

Sumber: Polda Jawa Tengah

r) revisi

Tabel 21 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota, 2012– 2014

No	Kabupaten/Kota	2012 ^{r)}	2013 ^{r)}	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	669	471	377
2	Kab. Banyumas	436	460	379
3	Kab. Purbalingga	330	392	337
4	Kab. Banjarnegara	158	177	152
5	Kab. Kebumen	299	426	324
6	Kab. Purworejo	372	406	365
7	Kab. Wonosobo	272	226	186
8	Kab. Magelang	381	335	218
9	Kab. Boyolali	387	413	391
10	Kab. Klaten	863	778	695
11	Kab. Sukoharjo	449	465	431
12	Kab. Wonogiri	180	211	236
13	Kab. Karanganyar	366	413	434
14	Kab. Sragen	693	354	319
15	Kab. Grobogan	279	166	150
16	Kab. Blora	239	262	300
17	Kab. Rembang	338	435	325
18	Kab. Pati	692	521	556
19	Kab. Kudus	682	476	406
20	Kab. Jepara	556	618	742
21	Kab. Demak	620	577	451
22	Kab. Semarang	529	594	596
23	Kab. Temanggung	473	392	399
24	Kab. Kendal	266	319	290
25	Kab. Batang	283	181	170
26	Kab. Pekalongan	337	330	251
27	Kab. Pemaslang	310	245	308
28	Kab. Tegal	205	231	248
29	Kab. Brebes	274	162	147
30	Kota Magelang	152	145	140
31	Kota Surakarta	1 660	1 662	1 467
32	Kota Salatiga	451	637	702
33	Kota Semarang	4 031	3 550	3 510
34	Kota Pekalongan	518	405	361
35	Kota Tegal	344	368	248
Provinsi Jawa Tengah		19 094	17 803	16 611

Sumber: Polda Jawa Tengah

r) revisi

Tabel 22 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) Per 10.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2012–2014

No	Kabupaten/Kota	2012 ^{r)}	2013 ^{r)}	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	4	3	2
2	Kab. Banyumas	3	3	2
3	Kab. Purbalingga	4	4	4
4	Kab. Banjarnegara	2	2	2
5	Kab. Kebumen	3	4	3
6	Kab. Purworejo	5	6	5
7	Kab. Wonosobo	4	3	2
8	Kab. Magelang	3	3	2
9	Kab. Boyolali	4	4	4
10	Kab. Klaten	7	7	6
11	Kab. Sukoharjo	5	5	5
12	Kab. Wonogiri	2	2	2
13	Kab. Karanganyar	4	5	5
14	Kab. Sragen	8	4	4
15	Kab. Grobogan	2	1	1
16	Kab. Blora	3	3	4
17	Kab. Rembang	6	7	5
18	Kab. Pati	6	4	5
19	Kab. Kudus	8	6	5
20	Kab. Jepara	5	5	6
21	Kab. Demak	6	5	4
22	Kab. Semarang	5	6	6
23	Kab. Temanggung	6	5	5
24	Kab. Kendal	3	3	3
25	Kab. Batang	4	2	2
26	Kab. Pekalongan	4	4	3
27	Kab. Pemalang	2	2	2
28	Kab. Tegal	1	2	2
29	Kab. Brebes	2	1	1
30	Kota Magelang	13	12	12
31	Kota Surakarta	33	33	29
32	Kota Salatiga	25	36	39
33	Kota Semarang	25	22	21
34	Kota Pekalongan	18	14	12
35	Kota Tegal	14	15	10
	Provinsi Jawa Tengah	6	5	5

Sumber: Polda Jawa Tengah

r) revisi

**Tabel 23 Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)
Menurut Kabupaten/Kota, 2012– 2014**

No	Kabupaten/Kota	2012 ^{r)}	2013 ^{r)}	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	431	366	383
2	Kab. Banyumas	395	393	309
3	Kab. Purbalingga	240	313	241
4	Kab. Banjarnegara	128	122	121
5	Kab. Kebumen	231	347	304
6	Kab. Purworejo	311	285	290
7	Kab. Wonosobo	198	166	159
8	Kab. Magelang	258	200	137
9	Kab. Boyolali	290	257	230
10	Kab. Klaten	731	676	634
11	Kab. Sukoharjo	379	369	349
12	Kab. Wonogiri	154	153	174
13	Kab. Karanganyar	279	305	319
14	Kab. Sragen	390	273	220
15	Kab. Grobogan	223	124	110
16	Kab. Blora	210	226	264
17	Kab. Rembang	267	319	223
18	Kab. Pati	424	339	379
19	Kab. Kudus	316	270	259
20	Kab. Jepara	443	459	448
21	Kab. Demak	398	379	284
22	Kab. Semarang	388	332	273
23	Kab. Temanggung	344	277	278
24	Kab. Kendal	198	231	175
25	Kab. Batang	261	171	177
26	Kab. Pekalongan	230	215	208
27	Kab. Pemasang	281	210	284
28	Kab. Tegal	154	171	192
29	Kab. Brebes	218	129	96
30	Kota Magelang	106	105	99
31	Kota Surakarta	983	1 041	934
32	Kota Salatiga	252	387	349
33	Kota Semarang	1 411	1 281	1295
34	Kota Pekalongan	358	280	210
35	Kota Tegal	159	133	147
	Provinsi Jawa Tengah	12 039	11 304	10 .554

Sumber: Polda Jawa Tengah

r) revisi

Tabel 24 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*) Menurut Kabupaten/Kota, 2012– 2014

No	Kabupaten/Kota	2012 ^{r)}	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	64	78	102
2	Kab. Banyumas	91	85	82
3	Kab. Purbalingga	73	80	72
4	Kab. Banjarnegara	81	69	80
5	Kab. Kebumen	77	81	94
6	Kab. Purworejo	84	70	79
7	Kab. Wonosobo	73	73	85
8	Kab. Magelang	68	60	63
9	Kab. Boyolali	75	62	59
10	Kab. Klaten	85	87	91
11	Kab. Sukoharjo	84	79	81
12	Kab. Wonogiri	86	73	74
13	Kab. Karanganyar	76	74	74
14	Kab. Sragen	56	77	69
15	Kab. Grobogan	80	75	73
16	Kab. Blora	88	86	88
17	Kab. Rembang	79	73	69
18	Kab. Pati	61	65	68
19	Kab. Kudus	46	57	64
20	Kab. Jepara	80	74	60
21	Kab. Demak	64	66	63
22	Kab. Semarang	73	56	46
23	Kab. Temanggung	73	71	70
24	Kab. Kendal	74	72	60
25	Kab. Batang	92	94	104
26	Kab. Pekalongan	68	65	83
27	Kab. Pemasang	91	86	92
28	Kab. Tegal	75	74	77
29	Kab. Brebes	80	80	65
30	Kota Magelang	70	72	71
31	Kota Surakarta	59	60	64
32	Kota Salatiga	56	61	50
33	Kota Semarang	35	36	37
34	Kota Pekalongan	69	69	58
35	Kota Tegal	46	36	59
	Provinsi Jawa Tengah	63	63	64

Sumber: Polda Jawa Tengah

r) revisi

Tabel 25 Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kabupaten/Kota, Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin, 2014

No	Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-anak		Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Cilacap	395	7	11	0	406	7	413
2	Kab. Banyumas	337	4	7	0	344	4	348
3	Kab. Purbalingga	252	6	13	0	265	6	271
4	Kab. Banjarnegara	129	2	5	0	134	2	136
5	Kab. Kebumen	329	3	10	0	339	3	342
6	Kab. Purworejo	315	3	8	0	323	3	326
7	Kab. Wonosobo	175	0	4	0	179	0	179
8	Kab. Magelang	150	1	3	0	153	1	154
9	Kab. Boyolali	251	3	5	0	256	3	259
10	Kab. Klaten	693	7	13	0	706	7	713
11	Kab. Sukoharjo	382	3	8	0	390	3	393
12	Kab. Wonogiri	185	4	7	0	192	4	196
13	Kab. Karanganyar	353	3	3	0	356	3	359
14	Kab. Sragen	235	4	9	0	244	4	248
15	Kab. Grobogan	114	3	7	0	121	3	124
16	Kab. Blora	288	5	4	0	292	5	297
17	Kab. Rembang	249	0	2	0	251	0	251
18	Kab. Pati	410	8	8	0	418	8	426
19	Kab. Kudus	271	4	16	0	287	4	291
20	Kab. Jepara	485	7	12	0	497	7	504
21	Kab. Demak	307	3	10	0	317	3	320
22	Kab. Semarang	290	4	13	0	303	4	307
23	Kab. Temanggung	301	4	8	0	309	4	313
24	Kab. Kendal	174	9	14	0	188	9	197
25	Kab. Batang	191	3	5	0	196	3	199
26	Kab. Pekalongan	229	2	3	0	232	2	234
27	Kab. Pemasang	310	3	7	0	317	3	320
28	Kab. Tegal	205	5	6	0	211	5	216
29	Kab. Brebes	105	1	2	0	107	1	108
30	Kota Magelang	105	3	3	0	108	3	111
31	Kota Surakarta	1 034	13	4	0	1 038	13	1 051
32	Kota Salatiga	391	2	0	0	391	2	393
33	Kota Semarang	1 410	15	32	0	1 442	15	1 457
34	Kota Pekalongan	228	5	3	0	231	5	236
35	Kota Tegal	162	3	0	0	162	3	165
	Provinsi Jawa Tengah	11 438	152	265	0	11.703	152	11 855

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 26 Sepuluh Jenis Kejahatan Konvensional yang Sering Terjadi, 2014

No	Jenis Kejahatan Konvensional	Jumlah	
		Dilaporkan	Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pencurian dengan pemberatan (CURRAT)	2 439	1 346
2	Pencurian kendaraan bermotor roda 2 (CURRANMOR R2)	1 847	490
3	Penipuan	1 681	737
4	Perjudian	1 547	1 547
5	Penggelapan	1 511	866
6	Pencurian Biasa	916	493
7	Aniaya ringan	678	583
8	Narkotika (Dalam Negeri)	627	624
9	Pengroyokan	594	407
10	Kekerasan dalam rumah tangga	494	368

Sumber: Polda Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Statistik Kriminal 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Statistik Politik 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. 2014. *Hasil Pemilu Tahun 2014 Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: KPU Provinsi Jawa Tengah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Referensi Internet

<http://www.bps.go.id>

<http://www.wikipedia.org>

<http://www.jatengprov.go.id>

<http://www.kpu-jatengprov.go.id>

<http://www.dprd-jatengprov.go.id>

<http://jateng.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241
Telp. (024) 8412802 – 8412804, Fax. (024) 8311195
Homepage : <http://jateng.bps.go.id>, E-mail : bps3300@bps.go.id

ISBN 978-602-0916-46-0



9 786020 916460